



Konservasi
Alam Nusantara
Untuk Indonesia Lestari



TENGUYUN BERDESA

Cerita Perubahan Desa menuju Pembangunan Hijau di
Lanskap Kayan



Buku ini terbit atas dukungan:



TENGUYUN BERDESA

**Cerita Perubahan Desa menuju Pembangunan Hijau di
Lanskap Kayan**

TENGUYUN BERDESA : Cerita Perubahan Desa menuju Pembangunan Hijau di Lanskap Kayan

Penulis:

Dina Mariana

Rajif Dri Angga

Dinda Ahlul Latifah

Sukasmanto

Rifan Madani

Naghma Saniyyah

Amalia Tri Widya Ningrum

Muhammad Satria Ramanda

Reviewer:

Eko Cahyono

Tata Sampul dan Isi

Rifan Madani

Suparmo

Cetakan Pertama, 2025

TENGUYUN BERDESA

Cerita Perubahan Desa menuju Pembangunan Hijau di Lanskap Kayan

*Institute for Research and Empowerment
(IRE)*

“

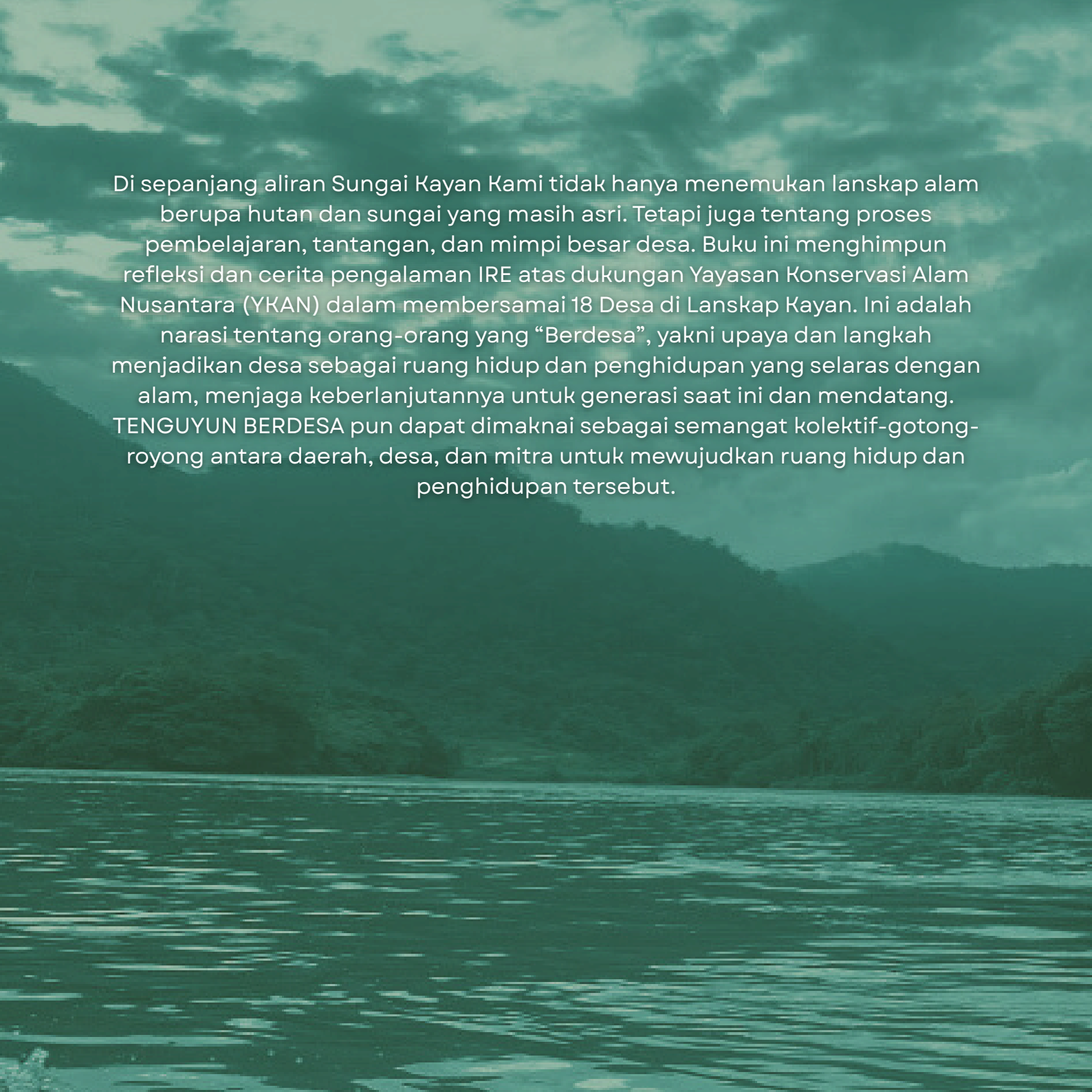
Sebagai bagian dari perayaan “*Birau*” HUT Kota Tanjung Selor Ke-235 dan Kabupaten Bulungan Ke-65 Tahun 2025

Buku ini kami persembahkan untuk masyarakat Kabupaten Bulungan. Semoga menjadi inspirasi untuk terus berdaya dan berdesa.

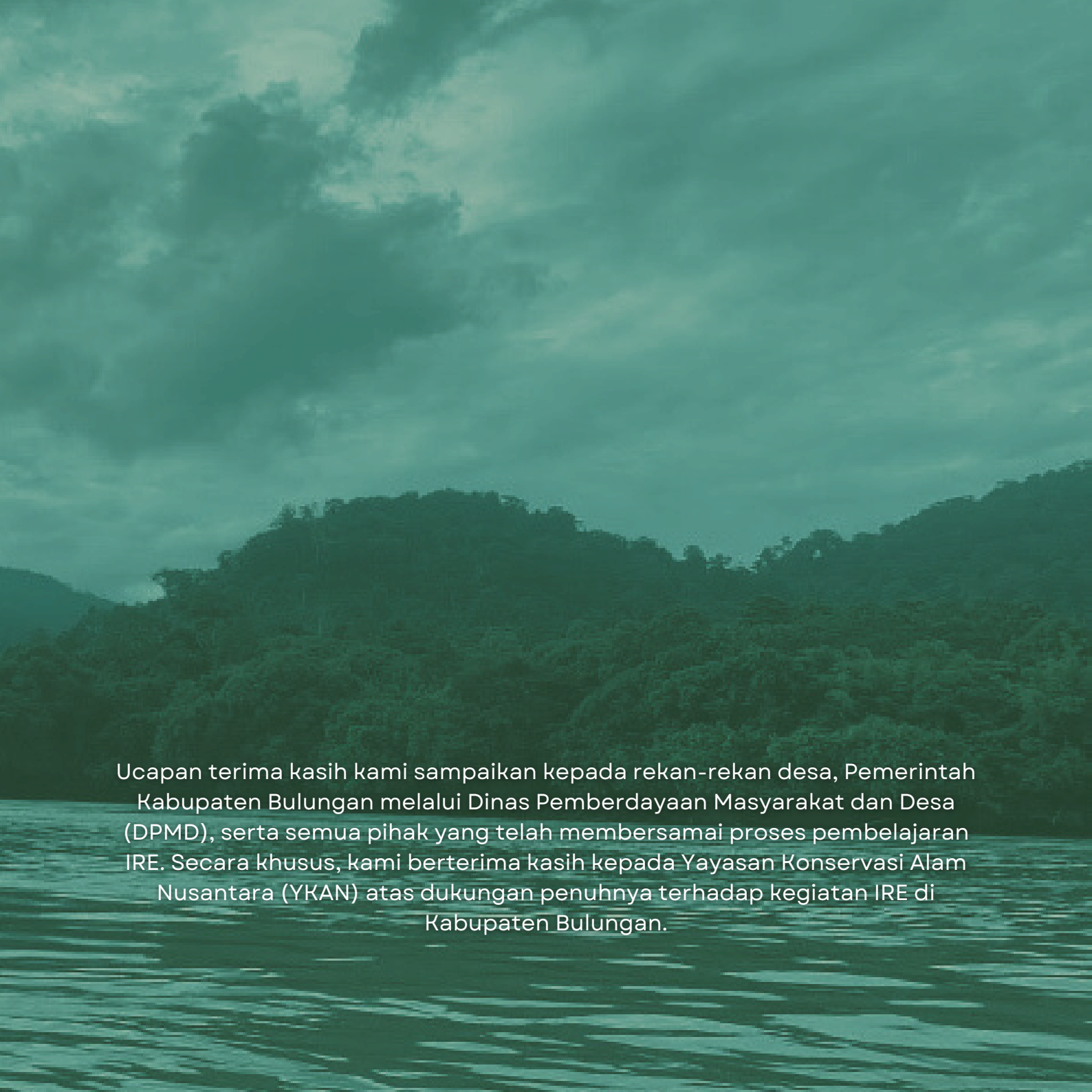
Tenguyun Berdesa Menuju BULUNGAN BISA!

”

Tanjung Selor, 12 Oktober 2025



Di sepanjang aliran Sungai Kayan Kami tidak hanya menemukan lanskap alam berupa hutan dan sungai yang masih asri. Tetapi juga tentang proses pembelajaran, tantangan, dan mimpi besar desa. Buku ini menghimpun refleksi dan cerita pengalaman IRE atas dukungan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dalam membersamai 18 Desa di Lanskap Kayan. Ini adalah narasi tentang orang-orang yang “Berdesa”, yakni upaya dan langkah menjadikan desa sebagai ruang hidup dan penghidupan yang selaras dengan alam, menjaga keberlanjutannya untuk generasi saat ini dan mendatang. TENGUYUN BERDESA pun dapat dimaknai sebagai semangat kolektif-gotong-royong antara daerah, desa, dan mitra untuk mewujudkan ruang hidup dan penghidupan tersebut.



Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan desa, Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta semua pihak yang telah kebersamai proses pembelajaran IRE. Secara khusus, kami berterima kasih kepada Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) atas dukungan penuhnya terhadap kegiatan IRE di Kabupaten Bulungan.



PENGANTAR DIREKTUR EKSEKUTIF IRE

Nama Bulungan bagi banyak orang mungkin tidak terlalu familiar dan sering disalahartikan sebagai salah satu nama kawasan di Jakarta Selatan. Namun demikian, kabupaten yang letaknya di ujung utara Pulau Kalimantan ini mempunyai kesan mendalam. Bukan hanya karena sejarahnya pada masa lalu sebagai wilayah Kesultanan Bulungan, namun karena komitmen yang kuat dari pemerintah daerahnya untuk menjaga kelestarian alamnya. Tak banyak daerah yang secara gamblang menegaskan komitmen konservasi dan mengembangkan pembangunan hijau seperti Bulungan.

Kedaulatan pangan, pembangunan berkelanjutan, dan kini pembangunan hijau adalah komitmen politik kabupaten yang secara jelas juga *ternarasikan* dalam kebijakan daerah. Tak hanya itu, desa sebagai entitas yang paling dekat dengan masyarakat sekaligus lingkungan alamnya juga mendapat perhatian besar oleh daerah. Melalui slogan bernuansa bahasa lokal, **“Tenguyun Membangun Desa”**, perhatian itu nampak jelas tergambar. Itu pula kesan yang kami tangkap selama dua tahun terakhir menjalankan kerja-kerja pendampingan di Kabupaten Bulungan.

Oleh pemerintah daerah, desa, dan mitra lokal lainnya, kami diterima dengan baik sebagai teman yang sama-sama ingin belajar dan berkembang. Keterbukaan, penerimaan yang hangat, serta kemauan untuk belajar dari semua pihak adalah energi positif yang memungkinkan kami untuk konsisten dalam menemani proses perubahan di desa-desa di Kabupaten Bulungan. Buku ini adalah catatan perjalanan dari desa-desa di Lanskap Kayan yang dua tahun terakhir kami kumpulkan sebagai dokumentasi otentik dari proses





PENGANTAR DIREKTUR EKSEKUTIF IRE

pembelajaran dalam upaya penguatan pemerintah desa dan BUM Desa untuk pengelolaan SDA lestari. Di samping itu, buku ini juga dimaksudkan sebagai catatan reflektif baik bagi kami maupun pihak lain yang tengah bekerja pada isu serupa sehingga dapat diambil sebagai pembelajaran.

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Desa, BPD, BUM Desa, dan kelompok masyarakat di 17 desa di Lanskap Kayan yang telah menyambut “tamu” dari Jogja ini hadir kebersamai proses berdesa.

Tak hanya itu, kepada Pemerintah Kabupaten, terutama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) beserta pendamping desa, kami juga sampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja-kerja kolaboratif yang tak mudah dalam menemani proses perubahan di desa-desa. Dan tentu kami juga menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) yang telah memberikan kami kesempatan yang berharga untuk menjadi teman belajar di Bulungan sekaligus membuka cakrawala pengetahuan kami dalam belantara isu konservasi dan pengelolaan SDA lestari. Kami juga menyampaikan terima kasih dan salam hangat bagi mitra kami di Bulungan, terutama Yayasan Pionir sebagai partner sharing kami selama ini. Terima kasih juga kami sampaikan atas kerja keras dari tim lapangan kami: Ahlul, Rifan, Naghma, Amalia, Satria yang mendokumentasikan cerita-cerita perubahan di lapangan serta mengorganisir kerja-kerja advokasi dan pendampingan. Kerja-kerja cerdas





PENGANTAR DIREKTUR EKSEKUTIF IRE

itu dapat berjalan dengan baik tentu berkat pendampingan dan ‘arahan’ dari Senior bertangan dingin namun tetap hangat, Mbak Dina Mariana, kami sampaikan terima kasih.

Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi dokumentasi berharga bagi desa-desa yang tengah bekerja keras menjaga kelestarian alam dan sumber dayanya serta menjadi pembelajaran yang dapat dipetik untuk disebarluaskan.

Salam lestari, Salam berdesa.

Rajif Dri Angga, S.IP., M.A.





DAFTAR ISI

	Hal
PENGANTAR DIREKTUR EKSEKUTIF IRE	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
Bab I Desa, Gagasan Pembangunan Hijau dan Konteks Pogram	1
Sebuah Pengantar	2
Milir Belajar	9
Pengelolaan SDA secara Lestari	12
Membangun Ruang Percakapan “Berdesa”	13
Bab II Kerangka Program	16
Pengarusutamaan Pembangunan Hijau hingga ke Desa	17
Potensi Kemakmuran di Lanskap Kayan	22
Bab III Cerita Perubahan Desa	28
Desa Long Pelban	29
Desa Long Buang	32
Desa Long Bia	35
Desa Long Lasan	38
Desa Long Peso	41
Desa Lepak Aru	44
Desa Long Bang Hulu	46
Desa Long Bang	49
Desa Long Lembu	52





DAFTAR ISI

	Hal
Long Telenjau	54
Long Tunggu	57
Desa Naha Aya	60
Desa Long Beluah	63
Desa Long Sam	66
Desa Mara Hilir	69
Desa Mara I	72
Desa Antutan	75
Bab IV Cerita Perubahan Desa	78
Membumikan Pembangunan dan Pertumbuhan Hijau di Desa-Desa	
Lanskap Kayan	81
Menuju Perencanaan Desa yang Bermakna	81
Menginisiasi Nuansa Pembangunan Hijau dalam RPJM Desa Hijau	84
Mendampingi Desa Menyusun Peraturan Desa	89
BUM Desa untuk Pertumbuhan Hijau: Merintis Jalan Berliku	94
Menemani Kabupaten Memberdayakan Desa: Menjadi Bagian dari Mitra	
Bulungan Berdaulat (MBB)	102
Menjadi Mitra DPMD untuk Memberdayakan Desa	103
Kolaborasi Program Pendampingan Desa (Pendamping dan NGO)	106
Bulungan Menuju Transformasi Pembangunan Hijau	108
Literatur	113





DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Konotasi Inclusive Green Growth (IGG)	3
Gambar 1.2 Kerangka Kerja Pertumbuhan Ekonomi yang Ramah Lingkungan dan Inklusif (IGG)	4
Gambar 1.3 Kerangka Kerja Lanskap IPLC	5
Gambar 1.4 Kerangka Kerja Analisis Gender	7
Gambar 1.5 Kerangka Kerja Peningkatan Kapasitas Pemdes dan BUM Desa	8
Gambar 1.6 Tahapan Kegiatan Program	10
Gambar 2.1 Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bulungan 2021-2026	18
Gambar 2.2 Indikator Penilaian TAKE	19
Gambar 2.3 Rencana Kerja Desa	27
Gambar 4.1 Empat Aspek dalam Review RPJM Desa Hijau	86
Gambar 4.2 Perbandingan Penilaian Tiap Desa dan Aspek	88
Gambar 4.3 Tipologi Relasi Desa-Kabupaten	104
Gambar 4.4 Politik Transformasi untuk Pembangunan Hijau	111





DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1. Pemanfaatan Lahan dan Jumlah Penduduk di Lanskap Kayan	23
Tabel 2.2. Potensi pengembangan usaha dan komoditas yang berada pada 18 Desa Lanskap Kayan	25
Tabel 4.1 Skoring Review RPJM Desa Hijau di Lanskap Kayan	87
Tabel 4.2 Perdes Tata Kelola Lingkungan Desa-Desa di Lanskap Kayan	91
Tabel 4.3 Perkembangan BUM Desa di Lanskap Kayan (2022-2025)	98





DAFTAR SINGKATAN

AD	: Anggaran Dasar	Pemdes	: Pemerintah Desa
ART	: Anggaran Rumah Tangga	PEL	: Pengembangan Ekonomi Lokal
BUM Desa	: Badan Usaha Milik Desa	Pokdarwis	: Kelompok Sadar Wisata
BUM Desma	: Badan Usaha Milik Desa Bersama	PS	: Perhutanan Sosial
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa	RBD	: Rumah Belajar Desa
DPMD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>	RPJMDesa	: Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa
GAF	: <i>Gender Analysis Framework</i>	RPKP	: Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan
Gapoktan	: Gabungan Kelompok Tani Desa	SDA	: Sumber Daya Alam
GG	: Green Growth	SDGs	: Sustainable Development Goals
IAD	: <i>Integrated Area Development</i>	SDM	: Sumber Daya Manusia
IG	: <i>Inclusive Growth</i>	SID	: Sistem Informasi Desa
IGG	: <i>Inclusive Green Growth</i>	SIGAP	: Aksi Inspiratif Warga Untuk Perubahan
IPLC	: <i>Indigenous People Local Community</i>	TAKE	: Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi
IRE	: <i>Institute for Research and Empowerment</i>	YKAN	: Yayasan Konservasi Alam Nusantara
LPHD	: Lembaga Pengelola Hutan Desa	UU	: Undang-Undang
MBB	: Mitra Bulungan Berdaulat		
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>		
Musdes	: Musyawarah Desa		
NGO	: Non-Governmental Organization		
PADesa	: Pendapatan Asli Desa		



BAB I
**Desa, Gagasan
Pembangunan Hijau
dan Konteks Pogram**

Sebuah Pengantar

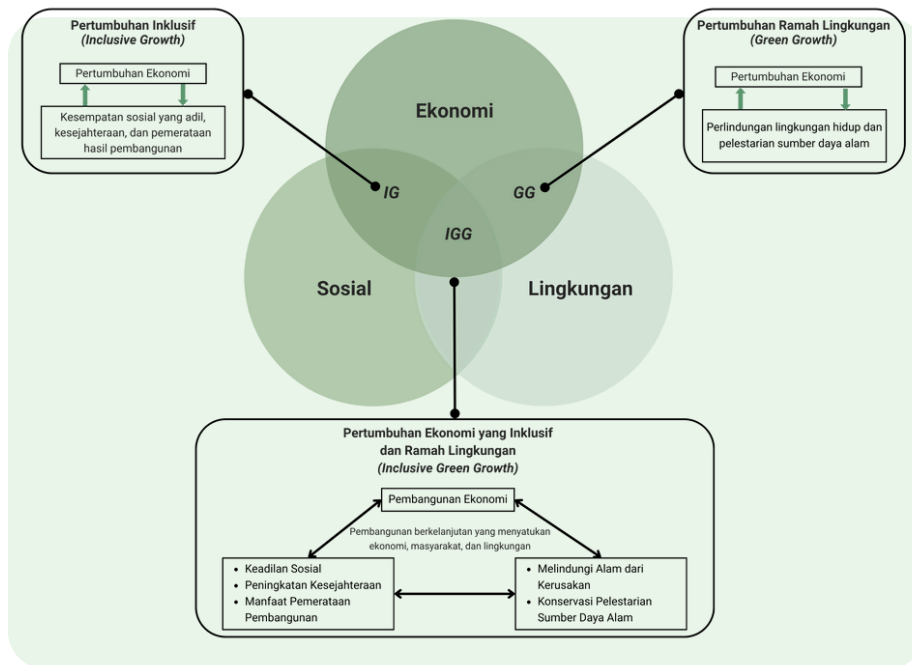
Desa menjadi arena yang kerap diperbincangkan dalam satu dekade terakhir ini, pasca lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Cara pandang negara terhadap desa sebagai objek pembangunan, serta posisinya secara struktural sebagai pemerintahan terendah di bawah kecamatan, mulai berubah dengan adanya kewenangan desa. Asas rekognisi dan subsidiaritas dalam UU Desa berkontribusi kuat membangun optimisme akan kesejahteraan desa, termasuk dalam pengelolaan aset dan potensi yang ada, utamanya Sumber Daya Alam (SDA).

Terlebih bagi daerah dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, seperti Kabupaten Bulungan yang memiliki hutan seluas ... hektar, serta potensi besar lainnya seperti dari sungai, laut, dan pertanian. Idealnya, 74 desa yang ada di daerah ini mampu bertumbuh secara mandiri karena adanya kewenangan lokal berskala desa. Namun, ceritanya cukup berwarna terkait dinamika daerah dan desa dalam implementasi UU Desa, dan buku ini menyajikan cerita-cerita lokal dari Kabupaten Bulungan yang menggambarkan tentang praktik-praktik berdesa yang terjadi di Lanskap Kayan, dimana terdapat 18 desa dengan 17 desa diantaranya memiliki area Perhutanan Sosial.

Kehadiran IRE sejak 2022 atas dukungan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) mengusung tema Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa (Pemdes) dan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang awalnya hadir di 10 desa dan dalam perkembangannya bertambah menjadi 17 desa di Lanskap Kayan hingga meluas ke seluruh desa lainnya yang ada di Kabupaten Bulungan.

Singkat cerita, program ini dirancang untuk mengajak desa membangun, sesuai dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki, melalui penataan kebijakan desa, penguatan kelembagaan, hingga peningkatan kapasitas Pemdes dan BUM Desa.

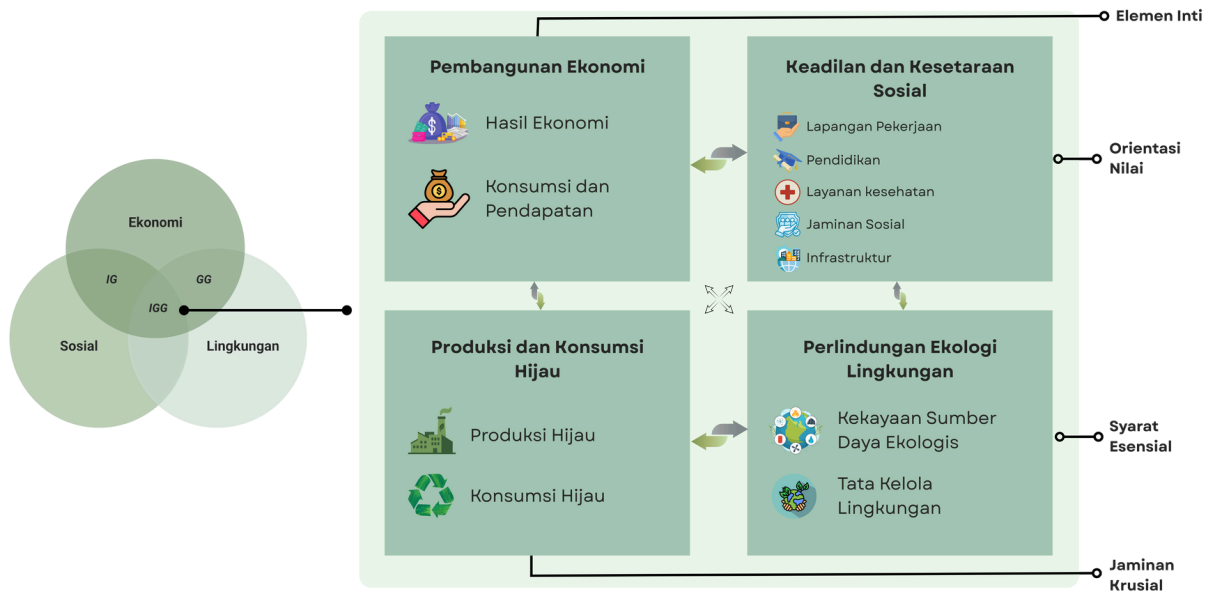
Gagasan pembangunan berkelanjutan dan pembangunan inklusif, khususnya dalam pengelolaan SDA untuk mendukung kedaulatan pangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 yang dirancang oleh Pemerintah Daerah menjadi pintu masuk, mengingat program ini juga berkepentingan dalam mendorong pembangunan lestari guna memastikan bahwa pembangunan di desa berpijak pada kepentingan sosial dan ekonomi dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.



Gambar 1.1 Konotasi *Inclusive Green Growth (IGG)*

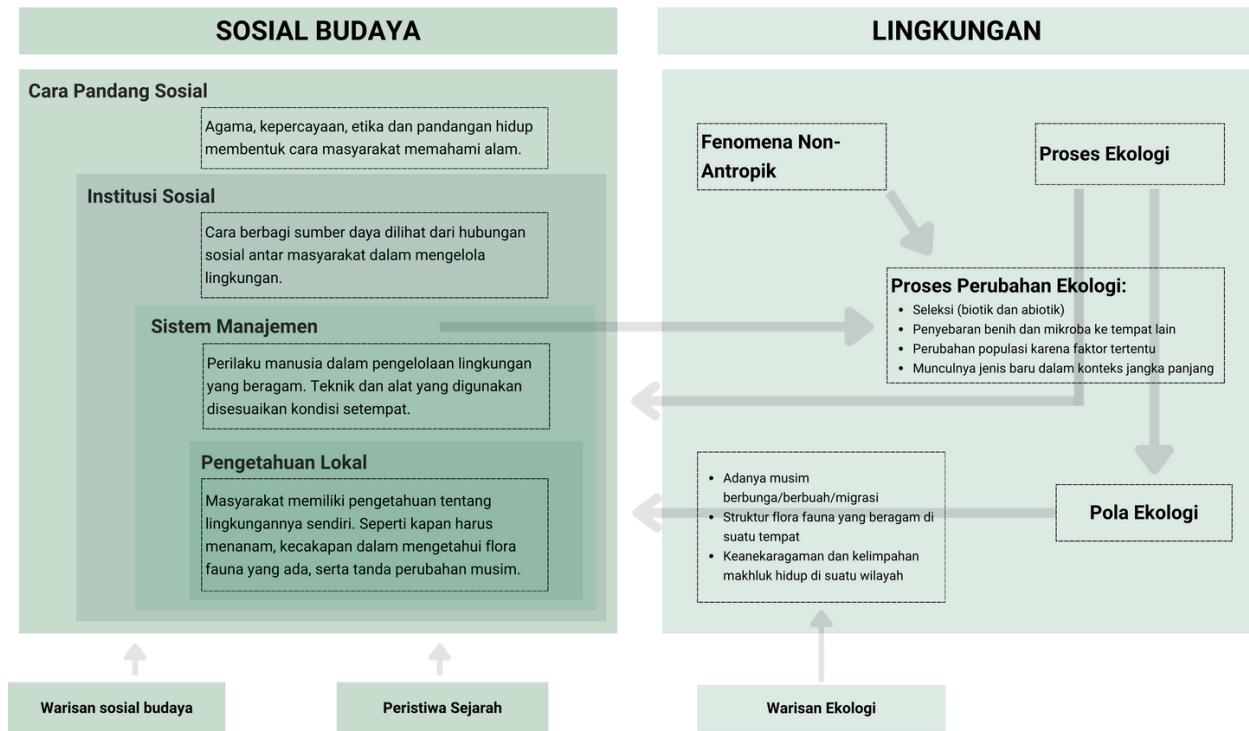
Salah satu konsep yang menarik dihubungkan dengan gagasan tersebut adalah *Inclusive Green Growth/IGG* atau pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan dan inklusif (World Bank, 2012; Spratt 2013), yang menekankan tentang koordinasi dan kombinasi yang non parsial antara pertumbuhan, inklusivitas dan keadilan ekologi dalam bingkai kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan.

IGG tidak hanya menekankan pada promosi konservasi lingkungan dan sumber daya ekologis, tetapi juga berfokus pada penguatan sosial dan kesejahteraan (Pouw dan Gupta, 2017; Gupta et al., 2015). IGG menyajikan fungsi dan karakteristik dasar yang terdiri dari empat dimensi, yaitu: pengembangan ekonomi, pemerataan kesempatan sosial, produksi dan konsumsi hijau, dan perlindungan lingkungan ekologis, sebagaimana tergambar sebagai berikut.



Gambar 1.2 Kerangka Kerja Pertumbuhan Ekonomi yang Ramah Lingkungan dan Inklusif (IGG)

Selain kerangka kerja IGG, program ini juga dikembangkan dengan mengadopsi kerangka kerja transformasi Lanskap *Indigenous People and Local Community/IPLC* atau Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (Moraes, 2021), dimana transformasi lanskap dipengaruhi interaksi antara sosial budaya dan lingkungan.



Gambar 1.3 Kerangka Kerja Lanskap IPLC
 Sumber: Diterjemahkan dari Moraes, 2021

Aspek lingkungan mencakup dua komponen: Proses ekologi dan pola ekologi. Elemen pola, seperti komposisi dan keragaman spesies, dapat dihasilkan melalui empat proses ekologi, yang selanjutnya dipengaruhi oleh fenomena non-antropik (misalnya, badai angin, petir, dan perilaku hewan) serta sistem pengelolaan manusia.

Sedangkan sosiokultur mencakup empat komponen: Cara pandang sosial, institusi sosial, sistem manajemen, dan pengetahuan lokal. Sistem manajemen mencakup perilaku manusia yang mentransformasi lanskap melalui manipulasi lingkungan yang memengaruhi proses ekologi. Pengelolaan tersebut mencakup pengetahuan lokal dan menghormati lembaga sosial, yang selanjutnya didasarkan pada pandangan dunia lokal. Pada saat yang sama sosial budaya mentransformasi lanskap melalui manajemen lingkungan, lingkungan memengaruhi sosial budaya, baik melalui proses ekologi maupun pola ekologi, karena keduanya dapat memengaruhi semua komponen sosial budaya. Hubungan timbal balik antara sosial budaya dan lingkungan ini terjadi dari generasi ke generasi melalui konstruksi budaya. Misalnya, pola ekologi yang dimodifikasi oleh satu generasi akan diwariskan kepada generasi berikutnya, sehingga pola tersebut merupakan warisan ekologi.

Artinya, lanskap kayan sebagai lokasi program ini bekerja perlu dilihat secara utuh bukan tentang apa yang terjadi saat ini saja, melainkan juga sejarah dan warisan budaya di masa lalu serta kondisi lingkungan (Warisan ekologi) yang mempengaruhi transformasi di lanskap kayan, baik sosial budayanya maupun lingkungannya.

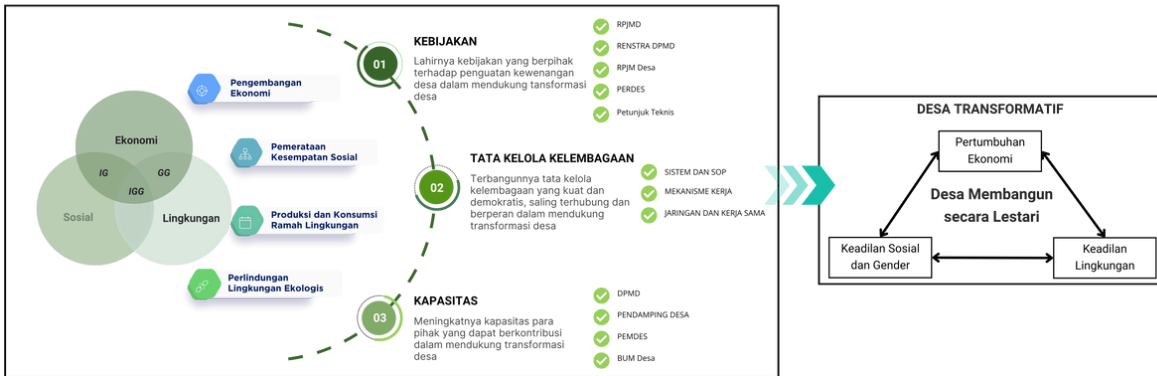
Terakhir, kerangka kerja yang juga diadopsi untuk membangun program ini adalah *Gender Analysis Framework (GAF)* atau kerangka kerja analisis gender yang dikembangkan oleh USAID (2017). Program ini terlebih dulu melihat relasi gender dan pembagian peran antara perempuan dan laki-laki di desa dalam 4 aspek utama, yaitu: (i) akses terhadap sumber daya; (ii) keyakinan dan persepsi; (iii) kelembagaan, hukum dan kebijakan; serta (iv) praktik dan partisipasi.



Gambar 1.4 Kerangka Kerja Analisis Gender
 Sumber: Diterjemahkan dari GAF USAID (2017)

Analisis gender di atas menjadi bagian penting dalam desain program ini untuk melihat potensi ketimpangan berbasis gender agar ruang-ruang ketidakadilan dapat diperkuat, sehingga dapat menjawab berbagai studi yang selama ini memotret tentang marginalisasi perempuan di arena-arena formal dan yang lebih spesifik tentang peran adat dalam peminggiran perempuan. Mengingat desa yang ada Lanskap Kayan masih menjunjung tinggi nilai adat dan budaya lokal, terutama dua suku dominan, yaitu: Tidung dan Dayak.

Berangkat dari berbagai konsep dan kerangka kerja yang ada, dihubungkan dengan semangat daerah dan desa untuk bertumbuh dengan berbasis pada pengelolaan SDA secara berkelanjutan dan inklusif, maka IRE sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, hadir berkontribusi dengan rancang bangun program, sebagai berikut:



Gambar 1.5 Kerangka Kerja Peningkatan Kapasitas Pemdes dan BUM Desa

IRE menggunakan istilah **“Desa Transformatif: Membangun secara Lestari”** berangkat dari kehendak kuat desa untuk melakukan perubahan terutama pada arena Pemdes dan BUM Desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA berbasis Perhutanan Sosial yang ada di Lanskap Kayan. Lestari dipilih sebagai diksi yang mudah dipahami oleh desa untuk menerjemahkan konsep pembangunan berkelanjutan yang diusung oleh Pemerintah Daerah.

Meski desain program yang dibangun oleh IRE berfokus pada peningkatan kapasitas Pemdes dan BUM Desa, namun tidak dapat dilepaskan dari pentingnya dukungan kebijakan dan tata kelola kelembagaan sebagai *enabling environment* menuju terwujudnya desa yang mandiri dan lestari. Karena itu, pendekatan melalui aspek kebijakan dan kelembagaan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan meski dengan porsi yang terbatas.

“Kelas Belajar Akademi SIGAP” menjadi menu utama program ini, yang dibangun dengan menggunakan pendekatan SIGAP (Aksi Inspiratif Warga untuk Perubahan). Pendekatan SIGAP merupakan pendekatan partisipatoris yang dikembangkan oleh YKAN sejak tahun 2010 untuk menumbuhkan inisiatif dan kolaborasi warga desa.

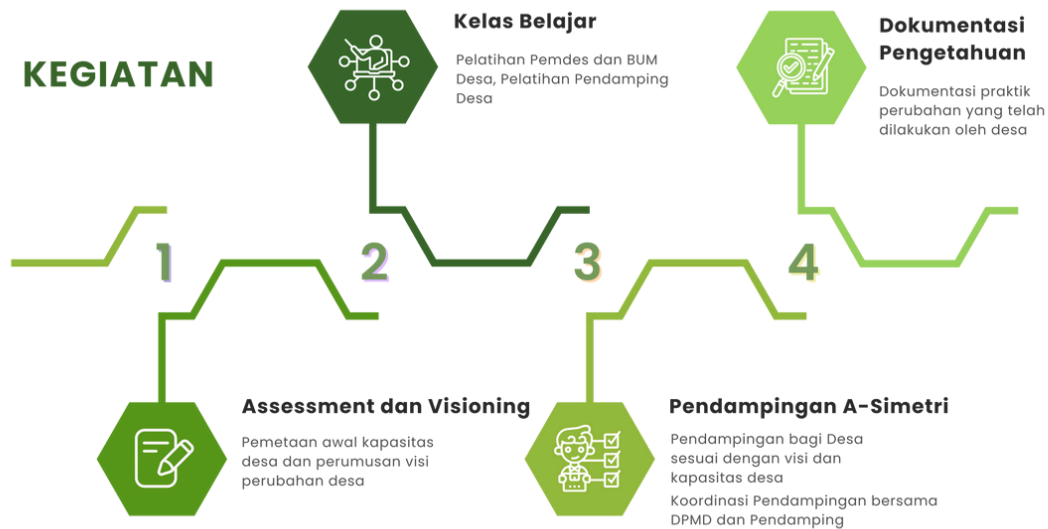
Pendekatan ini terdiri dari tujuh tahapan, mulai dalam proses pelibatan masyarakat hingga pelaksanaan dan pemantauan program. Tujuh tahapan dalam pendekatan SIGAP adalah:

1. *Disclosure*: mendekatkan diri, hati dan pikiran bersama
2. *Define*: dialogkan tema perubahan/ membangun percakapan tematik
3. *Discover*: dapatkan kekuatan untuk menemukenali dan memetakan kekuatan (potensi) dan asset yang dimiliki masyarakat
4. *Dream*: Deklarasikan impian bersama
5. *Design*: Detailkan rencana perubahan
6. *Delivery*: Daya upayakan keberhasilan
7. *Drive*: Dengungkan keberhasilan

Kerangka Kerja IGG, IPLC dan GAF inilah yang menjadi warna penting dalam menggunakan pendekatan SIGAP pada program ini, dengan harapan kelas belajar ini selain kaya dengan metode yang menarik dan kontekstual berbasis lokalitas yang ada di Lanskap Kayan, juga kuat secara substansi untuk mendukung transformasi desa. Meski, IRE menyadari ada banyak limitasi yang dapat dilakukan dalam pengembangan program ini, mengingat program ini mensyaratkan komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan BUM Desa sebagai institusi strategis mewujudkan desa transformatif.

Milir Belajar

Sejak awal, kegiatan kelas belajar ini dirancang berbasis pada hasil assessment yang dilakukan di 10 desa (Tahap I) dan 17 desa (Tahap II), dimana hasil assessment inilah yang digunakan oleh desa untuk membangun mimpi perubahan desa. Setiap desa diajak untuk merumuskan visi perubahannya, dengan tetap memperhatikan visi dan mimpi desa yang telah dibangun dalam Dokumen RPJM Desa.



Gambar 1.6 Tahapan Kegiatan Program

Program ini memang mensyaratkan sejumlah komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah (Khususnya DPMD yang memiliki peran pembinaan dan pengawasan desa) dan Desa (Pemerintah Desa dan BUM Desa). Komitmen yang dimaksud, antara lain: *Pertama*, **komitmen politik**, keinginan untuk berubah menjadi desa transformatif sesuai dengan visi perubahan yang telah dibangun. *Kedua*, **komitmen anggaran**, dimana DPMD dan desa membiayai kebutuhan secara mandiri dalam kelas belajar ini sesuai dengan kapasitas keuangan yang dimiliki. Dan tantangan yang cukup serius adalah akses dari desa ke lokasi pelatihan yang cukup jauh sehingga membutuhkan biaya yang tinggi. *Ketiga*, **komitmen teknokratik**, komitmen untuk mendokumentasikan pengetahuan dalam kelas belajar menjadi dokumen-dokumen strategis yang dapat digunakan oleh DPMD, Pemdes dan BUM Desa dalam membangun desa. *Keempat*, **komitmen manajerial**, komitmen untuk membangun tata kelola yang baik sesuai dengan perencanaan yang telah dibangun.

Meskipun disyaratkan dengan sejumlah komitmen tersebut, perjalanan desa berproses selama implementasi program ini, nampak semangat yang kuat dari desa-desa yang ada di Lanskap Kayan untuk terus belajar dan melakukan perubahan-perubahan. Terbukti, setiap kelas belajar yang dilaksanakan selalu diramaikan oleh desa yang secara serius hadir dan saling belajar antara desa satu dengan desa lainnya. Padahal, jarak dan anggaran yang harus mereka keluarkan tidaklah kecil, terlebih bagi Desa Long Pelban yang terletak paling ujung dan membutuhkan waktu 4 jam menggunakan speedboat untuk hadir di Tanjung Selor sebagai pusat kabupaten tempat diselenggarakannya kelas belajar ini. Dan bagi desa-desa di Lanskap Kayan, mereka seringkali menggunakan istilah “**Milir Belajar**” yang artinya menuju ke Hilir aliran Sungai Kayan untuk mengikuti kelas belajar.

Kelas belajar dalam program ini awalnya dibangun secara formal layaknya pelatihan pada umumnya, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh DPMD yang juga menjadi bagian penting dari program ini. Kelas belajar ini diselenggarakan secara terpisah maupun bersama-sama antara kelas belajar Pempdes dan kelas belajar bagi Pengurus BUM Desa. Dalam perkembangannya, kelas belajar ini terus beradaptasi, tidak hanya dilakukan di Tanjung Selor, namun juga mulai bergeser ke desa-desa yang dapat menjadi titik kumpul terdekat.

Selain itu, kelas belajar yang awalnya terbangun secara formal, mulai dikembangkan juga kelas belajar non formal, yang oleh IRE disebut dengan pendampingan. Kegiatan ini dirancang berangkat dari kebutuhan desa untuk terus belajar mempraktikkan dan melanjutkan apa yang telah diperoleh dari kelas formal. IRE mulai melakukan pendampingan khususnya sejak Tahun 2024 dengan pendekatan pendampingan a-simetris, dimana kelas pendampingan dilakukan secara spesifik sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing desa. Namun terbatasnya sumber daya yang dimiliki (limitasi), pendampingan ini memang tidak dapat terlembagakan secara kuat.

Pengelolaan SDA secara Lestari

Lanskap Kayan diusulkan sebagai *Integrated Area Development* (IAD) Kawasan Perdesaan Berbasis Perhutanan Sosial (PS) yang secara administrasi berada di 18 Desa dan tersebar di 4 Kecamatan dengan luas sekitar 568.182 hektar. Namun dalam perkembangannya, hanya ada 17 desa yang diidentifikasi memiliki lahan PS dan menjadi bagian dari program ini. Setiap desa memiliki potensi dari hasil hutan yang cukup kaya, dan ini menjadi komoditas penting bagi desa untuk dikelola dan dikembangkan, mulai dari madu, kopi, kakao, maupun tanaman buah yang tumbuh banyak di hutan.

Bagi Pemdes dan BUM Desa, pemahaman dan pengetahuan tentang kewenangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan ini sangat penting untuk membangun kemandirian dan kesejahteraan desa. Karena itu, kelas belajar yang dirancang oleh IRE berfokus pada pengetahuan dan keterampilan yang mendukung pengelolaan dan pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki oleh desa, utamanya hutan.

Pemerintah Desa dikenalkan pada aspek tentang kewenangan dan kebijakan terkait perencanaan pembangunan, perlindungan maupun tata kelola hutan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) menjadi pintu masuk dalam membangun desa berbasis potensi SDA secara lestari, atau program ini mengenalkan dengan istilah yang mudah diingat “RPJM Desa Hijau”. Membangun RPJM Desa perlu dipahami dari hulu hingga hilir, mulai dari aspek teknokratik, substantif, proses hingga dampak yang berpotensi dimunculkan. Kerangka kerja yang dibangun dalam program ini membantu untuk merumuskan instrumen identifikasi guna memastikan terbangunnya RPJM Desa Hijau.

Sedangkan di tingkat BUM Desa, berfokus pada membangun kelembagaan yang demokratis (memastikan bahwa partisipasi, transparansi dan akuntabilitas bekerja) hingga membangun perencanaan bisnis yang lestari berbasis aset dan potensi yang dimiliki.

Meski untuk BUM Desa, kondisinya cukup berbeda dengan Pemdes, dimana IRE mengawali program ini dengan kondisi BUM Desa yang nyaris tidak aktif hampir di semua desa.

Namun, IRE mencatat bahwa Pemdes dan BUM Desa yang ada di Lanskap Kayan sesungguhnya memiliki komitmen yang kuat untuk bertransformasi, hanya saja terbentur pada persoalan pengetahuan, jaringan maupun infrastruktur yang dapat mendukung akses pemasaran komoditas yang ada.

Membangun Ruang Percakapan “Berdesa”

Selain kelas belajar, program ini juga mengembangkan hadirnya ruang-ruang percakapan informal sebagai arena alternatif penguatan diskursus berdesa. Pemerintah Desa dan BUM Desa bukan hanya bertemu dalam ruang formal, melainkan aktif memperbincangkan mimpi, pengalaman hingga tantangan berdesa di warung kopi, kantor desa dan kecamatan, kantor NGO hingga berbagai ruang pertemuan lainnya.

Percakapan sederhana yang dibangun tidak sebatas pada isu tentang menyusun RPJM Desa yang sederhana namun bermakna, merancang peraturan desa yang melampaui (beyond) norma, melainkan juga tentang pengelolaan aset dan potensi desa, terutama pemanfaatan hutan dengan komoditas tanaman buah dan kopi yang cukup kaya. Ruang percakapan inilah yang selanjutnya membangun kesepakatan beberapa desa untuk membentuk Rumah Belajar Desa (RBD). Kata “Rumah” memang tidak merujuk pada bangunan fisik, melainkan ruang atau arena bertemunya ide dan gagasan perubahan melalui percakapan yang produktif.

RBD pastinya tidak terbatas sebagai ruang para elit desa, melainkan ruang bagi seluruh publik di desa untuk bercakap-cakap, termasuk BUM Desa, kelompok tani, Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), karang taruna, dan kelompok masyarakat lainnya.

Ruang publik seperti inilah yang dibayangkan oleh Habermas (1962) dapat tumbuh semarak termasuk di desa, dimana masyarakat dapat terus memperbincangkan isu-isu publik yang dapat ditangkap oleh pemerintah guna mempengaruhi pembentukan kebijakan publik. Habermas menempatkan peran serta masyarakat dalam kehidupan bernegara sangat penting. Peran itu hanya bisa terwujud kalau ada komunikasi bagus antara masyarakat dan pemimpin. Negara harus bisa memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi. Inilah yang dalam teori Jurgen Habermas disebut dengan Demokrasi Deliberatif (Hardiman, 2009).

RE (2017) memandang bahwa desa dapat menjadi situs baru demokrasi lokal, di tengah pesimisme publik terhadap demokrasi nasional (Baca: elektoral) yang melahirkan para pemimpin dengan wajah oligarki. Di desa, elit dan masyarakat dapat berkumpul, berbincang dan membangun gagasan produktif dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) melalui ruang-ruang publik yang diperluas.

Meski tidak dapat dipungkiri, bahwa cukup banyak studi yang memotret kerentanan desa sebagai arena pertarungan sumber daya alam, sehingga potensi elite capture, patron client dan politik kekerabatan masih cukup kuat mewarnai dinamika demokrasi di desa (Sidel, 2004; Klinken, 2014). Persoalan inilah yang perlu dijawab dengan membangun pengetahuan, membentuk kesadaran dan menciptakan aksi kolektif untuk secara bersama-sama menjaga, melestarikan dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada.

“Tenguyun Bangun Desa” menjadi *tagline* yang banyak digunakan dalam pelaksanaan program ini, guna memastikan bahwa demokrasi bekerja secara kuat di desa melalui musyawarah dan gotong royong yang menjadi identitas masyarakat Tidung dan Dayak sebagai suku dominan di Lanskap Kayan.



BAB II

Gambaran Umum

Pengarusutamaan Pembangunan Hijau hingga ke Desa

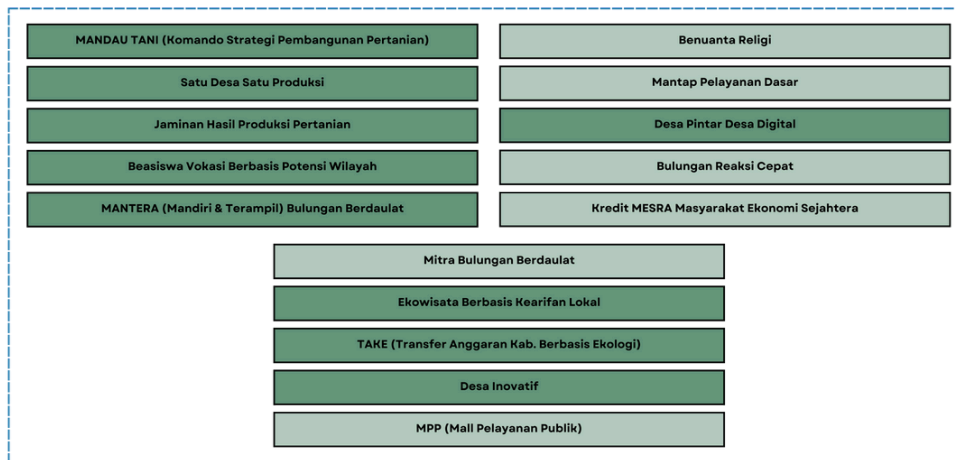
Pembangunan berkelanjutan menjadi tagline yang diserap oleh banyak Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan yang terkonfirmasi dalam Dokumen RPJMD. Suatu pertanda baik ketika daerah mulai berpikir tentang membangun aspek ekonomi, sosial dan lingkungan secara adil tanpa ada yang dikorbankan. Terlebih pemerintah juga seringkali mengingatkan soal target *Sustainable Development Goals (SDGs)* dengan 17 indikator yang harus dicapai hingga 2030, yang artinya tinggal 5 tahun tersisa waktu untuk mengejar tujuan tersebut.

Pertumbuhan ekonomi sudah tidak menjadi satu-satunya target yang dikejar oleh pemerintah daerah saat ini, terlebih bagi daerah yang selama ini dikenal memiliki kekayaan SDA dan karakter masyarakat adat yang masih kuat, seperti Kabupaten Bulungan. Kabupaten Bulungan dengan hutan yang masih cukup luas, terutama di Lanskap Kayan, sungai, laut dan area pertanian perlu terus dijaga kelestariannya dan memberi manfaat bagi kemakmuran masyarakat lokal. Inilah yang sepertinya menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, sebagaimana tercermin dalam Dokumen RPJMD maupun kebijakan daerah lainnya.

Visi “**Mewujudkan Kabupaten Bulungan yang Berdaulat Pangan, Maju dan Sejahtera**” yang diperkuat melalui 5 misi yaitu:

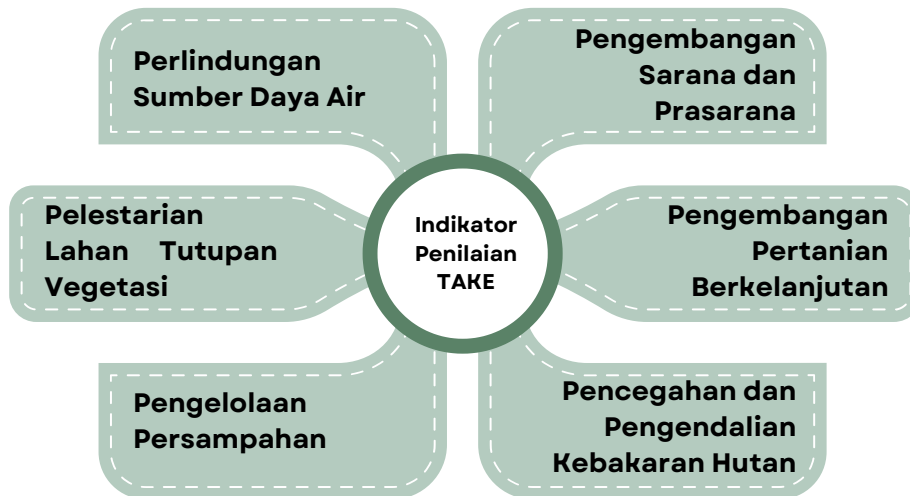
1. Mewujudkan kedaulatan pangan yang berbasis kearifan lokal;
2. Memantapkan infrastruktur sebagai pendukung utama pengembangan ekonomi rakyat dan pelayanan dasar masyarakat;
3. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, keuangan daerah yang sehat dan inovasi pembiayaan pembangunan untuk mendorong pembangunan Kabupaten Bulungan;
4. Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, cerdas, berkarakter dan berdaya saing;
5. Memajukan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan SDA yang ramah lingkungan.

Pendekatan yang cukup menarik dari pelaksanaan visi dan misi ini adalah menjadikan desa sebagai pusat aktivitas pembangunan. Ini terkonfirmasi dari 15 program prioritas pembangunan daerah, 9 diantaranya berfokus di desa.



Gambar 2.1 Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bulungan 2021-2026

Salah satu program prioritas daerah yang menarik dan inovatif adalah Program Transfer Anggaran Berbasis Ekologi (TAKE). TAKE lahir dari Peraturan Bupati Kabupaten Bulungan No. 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus kepada Desa, dimana salah satu tujuannya adalah mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa, khususnya dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Pemanfaatan anggaran TAKE diperuntukkan untuk integrasi pembangunan antara daerah dan desa dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menjaga kelestarian hutan serta menjaga fungsi ekologi. TAKE diberikan pada desa-desa yang dapat memenuhi kualifikasi dan indikator tertentu yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan dan pengelolaan SDA.



Gambar 2.2 Indikator Penilaian TAKE

Pada tahun 2024 pemerintah daerah menggelontorkan anggaran sebesar Rp. 4 miliar untuk didistribusikan ke 33 desa dengan mekanisme kompetisi antar desa. Program TAKE menjadi salah satu strategi daerah untuk memberikan insentif dan penghargaan terhadap desa-desa yang dinilai mampu menjaga, melestarikan dan melakukan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Desa menyambut gembira program ini, karena ada insentif khusus bagi desa-desa yang memiliki inovasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Yang menarik dari program ini, desa tidak hanya dinilai inisiatif positifnya saja, melainkan juga kemampuan dalam melembagakan inisiatif tersebut dalam perencanaan pembangunan, sehingga harapannya program yang dirancang oleh desa memiliki keberlanjutan yang kuat.

Selain Program TAKE, pembangunan berkelanjutan yang menjadi mainstreaming pembangunan daerah juga diterjemahkan ke dalam gagasan pembangunan hijau di lanskap kayan melalui Program *Integrated Area Development* (IAD) berbasis perhutanan sosial dengan Tema “*Tenguyun Hutanku*” yang didesain bersama antara Pemda, YKAN dan beberapa Mitra Bulungan Berdaulat (MBB).

“*Tenguyun Hutanku*” adalah strategi Kabupaten Bulungan untuk mewujudkan 9 dari 15 prioritas pembangunan, yang mengintegrasikan pembangunan kawasan perdesaan dengan perhutanan sosial. *Tenguyun* berasal dari bahasa Bulungan yang merujuk ke semangat kebersamaan dalam mewujudkan sesuatu yang diharapkan. Dengan demikian, Kabupaten Bulungan akan mewujudkan pemeliharaan dan pemanfaatan hutannya, tanpa meninggalkan keragaman, kekhasan dan kearifan masyarakat lokalnya.

Warna pembangunan hijau yang cukup kental dalam kebijakan pembangunan daerah inilah yang cukup penting diinternalisasi hingga ke tingkat desa melalui penguatan RPJM Desa, yang secara sederhana sering dikenalkan oleh IRE dengan istilah RPJM Desa Hijau. Sedangkan pada tingkat BUM Desa, pilihan usaha atau bisnis yang dibangun pun harus memiliki “arah kiblat” yang sama, yaitu bisnis yang mengelola SDA secara lestari atau berkelanjutan.

Adanya sinergi yang kuat antara visi dan misi daerah dengan program yang diusung IRE, menjadikan program ini bertautan erat dengan pemerintah daerah, utamanya DPMD yang memiliki peran dan fungsi pembinaan dan pengawasan desa. Bersama DPMD inilah, IRE kerap berkolaborasi melalui program peningkatan kapasitas Pemdes dan BUM Desa dalam kerangka pembangunan hijau di Lanskap Kayan.

Selain IRE, cukup banyak mitra strategis pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan ini, yang biasa disebut dengan Mitra Bulungan Berdaulat (MBB) yang terdiri dari Institusi Pendidikan/Universitas, sektor swasta/perusahaan dan *Non Government Organization (NGO)*. Keterbukaan pemerintah daerah pada proses kolaborasi ini telah membuka ruang dialog dalam memperbincangkan isu-isu pembangunan hijau maupun melakukan aksi bersama hingga tingkat tapak. Percakapan pun tidak terbatas pada ruang formal namun juga ruang non formal sehingga kedalaman kualitas demokrasi terasa cukup kuat pada aspek kemitraan ini.

IRE sebagai mitra daerah dalam pembangunan di Lanskap Kayan faktanya tidak bekerja sendiri, masih cukup banyak MBB yang juga bekerja dan berkolaborasi sesuai dengan kapasitas dan peran masing-masing, dengan tujuan saling memperkuat, diantaranya ada Yayasan PIONIR yang bekerja membangun Sistem Informasi Desa (SID) sehingga bermanfaat dalam mendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa dan penguatan perencanaan bisnis BUM Desa karena identifikasi aset dan potensi yang tersedia. Selain itu, ada Perkumpulan Lingkar Hutan Lestari (PLHL) yang banyak mendampingi Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) dan selanjutnya juga terhubung kuat dengan program IRE, terutama dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan bisnis BUM Desa. Ada juga Yayasan NASTARI yang berfokus pada penguatan peran pendamping program SIGAP di Lanskap Kayan.

Potensi Kemakmuran di Lanskap Kayan

Lanskap Kayan terdiri dari 18 desa yang tersebar di 4 kecamatan, yaitu: (1) Kecamatan Peso (2) Kecamatan Peso Hilir, (3) Kecamatan Tanjung Palas Barat dan (4) Kecamatan Tanjung Palas. Tiap desa memiliki wilayah yang sangat luas, baik kawasan hutan maupun non kawasan hutan, dengan jumlah penduduk yang tidak padat (berdasarkan perhitungan BPS).

Tabel 2.1. Pemanfaatan Lahan dan Jumlah Penduduk di Lanskap Kayan

Kecamatan	Desa	Kawasan Hutan (ha)	Non Kawasan Hutan (ha)	Luas Area	Jumlah Penduduk (jiwa)
Peso	Long Pelban	86.574,46	4.688,29	91.262,75	261
	Long Lejuh	157.525,46	7.808,24	165.333,70	419
	Long Buang	13.266,69	4.798,18	18.064,87	404
	Long Bia	2.300,89	1.318,97	3.619,	491
	Long Lasan	12.564,45	1.605,43	14.169,88	467
	Long Peso	21.825,52	3.706,40	25.531,92	655
	Lepak Aru	34.585,11	5.967,91	40.553,02	467
Peso Hilir	Long Bang	16.157,40	1.713,81	17.871,21	749
	Long Bang Hulu	18.049,84	2.669,24	20.719,08	602
	Long Lembu	8.301,64	2.760,12	11.061,76	551

	Long Telenjau	2.511,27	3.658,99	26.170,26	348
	Long Tunggu	22.864,36	4.028,18	26.892,54	1028
	Naha Aya	30.974,70	4.916,57	35.891,27	936
Tanjung Palas Barat	Long Beluah	10.173,85	4.143,83	14.317,68	3077
	Long Sam	9.463,31	4.074,45	13.537,76	942
	Mara Hilir	9.459,24	1.663,26	11.122,50	744
	Mara Satu	11.635,04	4.372,66	16.007,70	1565
Tanjung Palas	Antutan	9.695,06	6.365,57	16.060,63	2306
Total		497.928,25	70.260,10	568.188,35	

Sumber: diolah dari Dokumen IAD Lanskap Kayan, 2024

Luasan lahan yang sangat produktif ini idealnya berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat desa yang ada di Lanskap Kayan, mengingat cukup banyak komoditas yang dapat dikembangkan di kawasan hutan. Beberapa komoditas dari 18 desa yang ada di Lanskap Kayan, tergambar sebagai berikut:

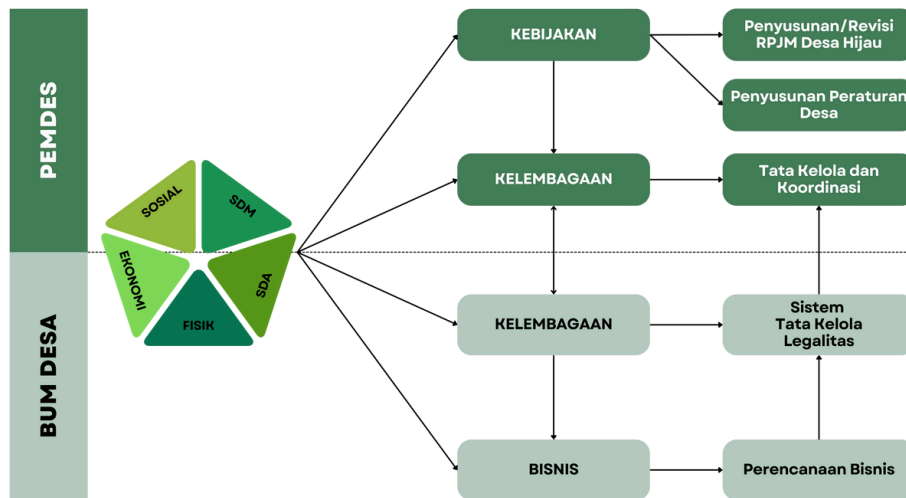
Tabel 2.2. Potensi pengembangan usaha dan komoditas yang berada pada 18 Desa Lanskap Kayan

Kecamatan	Desa	Potensi Agroforestri	Potensi Silvopastura	Potensi Hasil Hutan Non-Kayu	Potensi Wisata
Peso	Long Pelban	Anggrek, durian, langsung kakao	Babi	gaharu, pasak bumi, rotan, sirih, jamur.	Air terjun
	Long Lejuh	Kopi, Karet, Kakao,	Babi	Rotan	
	Long Buang	Duku, langsung, mangga, anggrek, keladi, Kopi	Babi	Rotan	Sumber mata air, air terjun
	Long Bia	Durian, duku, langsung, mangga, anggrek hutan, Kopi	Babi	Kulat, belawan, gaharu, rotan,	Sumber mata air
	Long Lasan	Kopi, Kakao	Babi		
	Long Peso	Keladi, anggrek, kakao, rambutan, pisang, kelapa, kopi	Babi	Gaharu, bambu, jamur	Sumber mata air, air terjun, sungai arung jeram
	Lepak Aru				Sumber mata air
Peso Hilir	Long Bang	Kakao, duku, kopi	Babi	Pasak bumi, rotan, pisang hutan, jamur	
	Long Bang Hulu	Durian, kakao, duku, kopi	Babi, sapi	Pasak bumi, tebu hutan; pisang, sirih hutan	
	Long Lembu		Babi		Sumber mata air
	Long Telenjau	Durian, cempedak, rambutan, kelapa,	Babi, kambing	Gaharu, rotan, bambu	Sumber mata air, air terjun

	Long Tungu	Ada, pisang, cempedak, durian, rambutan, kelapa	Babi, kambing	kapur, gaharu, rotan, sirih	Air terjun, danau
	Naha Aya				
Tanjung Palas Barat	Long Beluah	Durian, langsung	Sapi	Rotan	Makam Tua, Gunung Batu
	Long Sam	Kelengkeng, kakao, durian, nanas			Sumber mata air, air terjun, batu besar, gua
	Mara Hilir	Anggrek, kakao, cempedak, durian		Pakis, paku-pakuan, jamur, rotan	Air terjun
	Mara Satu	Durian, lada cempedak			
Tanjung Palas	Antutan	Kakao, durian, rambutan, durian, lada	Kambing, sapi	Gaharu, pepaya, nangka, pisang, mangga	Air terjun

Sumber: Dokumen IAD Lanskap Kayan, 2024

Berangkat dari data aset dan potensi yang ada, maka program ini mengawali dengan mengajak desa mengidentifikasi secara lebih utuh aset dan potensi yang dimiliki untuk dapat dikembangkan dalam kerangka pengembangan ekonomi desa berbasis SDA secara lestari. Intervensi yang dilakukan berangkat dari perumusan visi perubahan desa yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh desa, dimana desa akan membangun perencanaan di dua area perubahan, yaitu: Pemerintah Desa dan BUM Desa.



Gambar 2.3 Rencana Kerja Desa



BAB III

Cerita Perubahan

Desa



Long Pelban: Inovasi Menembus Isolasi

Tidak mudah akses dari Desa Long Pelban ke Tanjung Selor sebagai Ibu Kota Kabupaten Bulungan, ini bukan sekedar jarak karena posisinya yang terletak paling hulu Sungai Kayan, melainkan juga risiko jeram atau istilah lokal menyebut dengan kata jiram yang harus dilalui dengan taruhan nyawa. Beruntungnya, Desa Long Pelban dipimpin oleh Jhondersoni Tuban, sosok Kepala Desa yang nyaris tidak pernah absen dari Kelas Belajar Akademi SIGAP.

Jhon, panggilan akrabnya adalah tokoh muda yang memiliki semangat tinggi untuk membangun desa, meski awalnya pesimis mengingat akses yang sulit ketika ingin memasarkan berbagai produk dan komoditas unggulan yang ada di desa. Jhon tidak sendiri, bersama dengan perangkat desa lainnya, termasuk Santoso selaku Kaur Keuangan, menjadi peserta aktif dalam tiap kelas belajar yang diselenggarakan IRE.

Mimpi perubahan Desa Long Pelban sederhana, Long Pelban akan mengembangkan ekonomi desa melalui penguatan produksi dan pengolahan berbasis agroforestri, pertanian, dan perikanan yang terintegrasi. Mimpi ini dibangun atas pertimbangan mata pencaharian utama masyarakat desa bergerak di sektor pertanian dalam arti luas mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, hingga perikanan. Sayangnya, sistem pertanian yang dibangun masih bersifat subsisten sehingga belum berkontribusi kuat terhadap kesejahteraan masyarakat dan desa. Kendalanya masih soal akses ke pasar meski hasil panen melimpah. Secara umum, Pemerintah Desa awalnya memang belum memiliki perencanaan yang kuat terkait dengan pengelolaan SDA yang ada di desa, ini terkonfirmasi dari dokumen perencanaan pembangunan maupun belum terbangunnya BUM Desa sebagai institusi penggerak ekonomi lokal.

Terlebih dalam beberapa waktu terakhir, desa masih dihadapkan pada pesimisme karena narasi “desa akan ditenggelamkan” akibat Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sungai Kayan untuk suplai energi Ibu Kota Nusantara (IKN). Disorientasi perencanaan dan aglomerasi inilah yang menyebabkan Desa Long Pelban masih relatif jalan di tempat, meski dalam beberapa kesempatan, inisiatif positif sudah dilakukan dengan sangat baik, yang membawa Long Pelban sebagai desa terbaik Program TAKE Tahun 2023 dan mendapat anggaran sebesar Rp 460 juta. Ini membuktikan bahwa inovasi mampu menembus isolasi yang selama ini dirasakan oleh masyarakat Desa Long Pelban.

Saat ini, Desa Long Pelban terus bergerak untuk membenahi aspek kelembagaan dan kapasitas. Pada aspek kelembagaan, semangat untuk membangun BUM Desa yang bergerak dalam pengembangan ekonomi berbasis agroforestri terus diupayakan, terbukti dari adanya kegiatan dan anggaran yang akan dialokasikan untuk pembentukan BUM Desa. Selain itu, ada LPHD Long Pelban sebagai pemegang izin Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8543/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2023, pada tanggal 25 Agustus 2023 dengan luas kelola sebesar ±4.882 hektar yang berada pada Kawasan Hutan dengan fungsi sebagai Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Sedangkan di tingkat Pemerintah Desa, pengaturan tentang tata ruang dan pemanfaatan lahan sudah direncanakan dalam bentuk perencanaan pembangunan dan kelembagaan dalam peraturan desa.



Long Buang: Inisiasi Lintas Generasi untuk Desa Mandiri dan Hutan Lestari

Desa Long Buang bukan hanya kaya dengan sumber daya alamnya semata, tapi juga memiliki kekayaan budaya dan tradisi adat lokal yang masih cukup kental. Jauhnya jarak dan sulitnya akses Long Buang untuk menjangkau Ibu Kota Kecamatan tidak menyurutkan semangat dan komitmen mereka untuk berpartisipasi aktif dalam kelas belajar. Pemerintah Desa Long Buang tidak hanya memiliki kepedulian dan cinta pada desanya, tapi juga memiliki gagasan, arah dan komitmen dalam membangun desa. Desa Long Buang memiliki izin pengelolaan perhutanan sosial seluas 1026 Ha. Potensi itulah yang menjadi fokus desa dalam mendorong pengembangan ekonomi lokal berbasis hutan.

Prando Pit, Kepala Desa Long Buang menyadari bahwa hutan dan sumber daya alam yang mereka miliki adalah berkah yang harus dikelola dan dimanfaatkan untuk mewujudkan kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk mendorong kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakatnya, perencanaan dan kebijakan desa yang kuat dan berkualitas harus diimbangi oleh peran lembaga ekonomi lokal desa yang membuka ruang bagi tumbuhnya partisipasi masyarakat desa, terutama pemuda. Melalui ruang-ruang dialog dan pembelajaran bersama IRE, Pemerintah Desa Long Buang berbagi soal gagasan dan ide pengembangan ekonomi lokal yang mereka bayangkan.

Pemerintah Desa Long Buang memiliki komitmen yang cukup kuat untuk mendorong peran dan kiprah pemuda dalam pengembangan ekonomi lokal desa. Dorongan kuat Pemdes dan kelompok pemuda untuk menginisiasi lahirnya BUM Desa Long Buang akhirnya secara resmi terbentuk melalui terbitnya Peraturan Desa (Perdes) Long Buang No. 4 Tahun 2024 tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa Amerta Adijaya Long Buang dalam kegiatan

Musyawarah Desa. Eko Prastio, seorang guru SMP di Long Buang terpilih sebagai direktur BUM Desa Amerta Adijaya Long Buang. Bersama IRE, perjalanan BUM Desa Long Buang tumbuh melalui ruang-ruang dialog dan diskusi yang menghidupkan gagasan dan impian. Semua dimulai dari proses pemetaan potensi, penataan kelembagaan hingga inisiasi penyusunan rencana usaha dirintis sebagai langkah awal untuk memajukan desa.

Namun, pengembangan ekonomi lokal desa melalui BUM Desa tentu saja tidak terlepas dari berbagai tantangan dan dinamika kelembagaan. Memang tidak mudah untuk menyatukan gerbong gerakan yang baru saja dirintis, apalagi melibatkan kerjasama lintas generasi di dalamnya. Proses diskusi dan asistensi juga terus diupayakan untuk mengurai persoalan. Tantangan dan dinamika tersebut disadari sebagai sebuah proses dialektika dan dinamika dalam meniti impian bersama. Dialog dan refleksi juga terus dilakukan untuk memastikan adanya jalan untuk membangun jembatan yang dapat memperkuat gerakan ke depan.



Long Bia: Membangun relasi antar Institusi untuk saling bersinergi

Desa Long Bia menyajikan cerita bermakna tentang pentingnya membangun pondasi demokrasi melalui pilar partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang harus terus dibangun, terlebih dalam kerangka isu pengembangan ekonomi desa. Pemdes dan BUM Desa adalah institusi lokal yang memiliki peran strategis untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan (IGG).

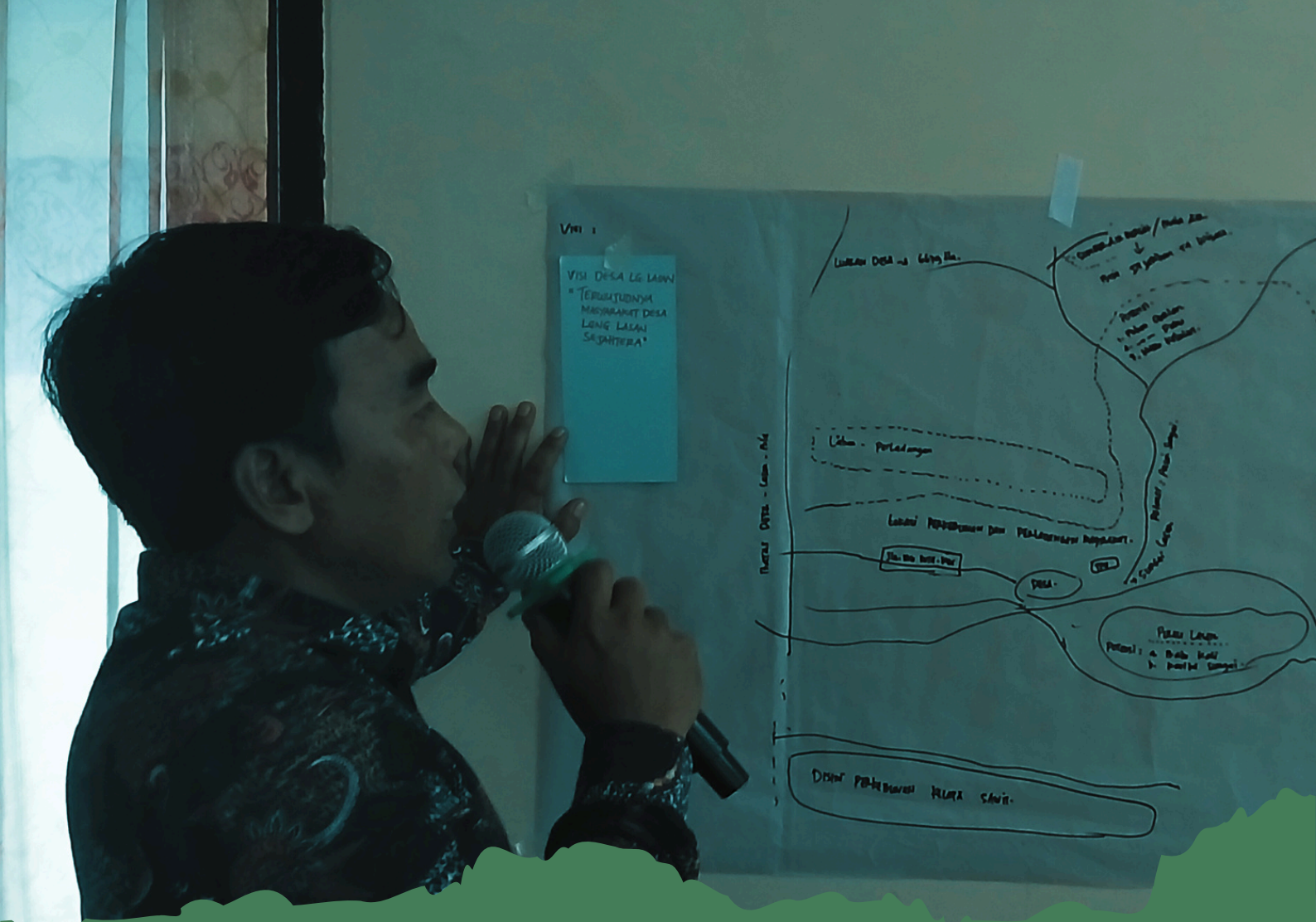
Meski di awal terjadi keterputusan koordinasi antara Pemdes dan BUM Desa, namun semangat untuk tetap mempertahankan BUM Desa nampak kuat karena BUM Desa dinilai sebagai lembaga ekonomi yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi desa. Relasi yang bersifat konfliktual antara Pemdes dan BUM Desa umum terjadi di banyak desa, terlebih ketika sudah ada penyertaan modal, bisnis sudah berjalan, lemahnya transparansi dan akuntabilitas, maupun aglomerasi modal (IRE, 2024).

Ali selaku Kepala Desa mengambil langkah bijak dengan membangun dialog yang intensif dengan pengurus BUM Desa guna mengurai persoalan yang dihadapi oleh BUM Desa. Pemdes maupun pengurus BUM Desa mengidentifikasi dengan cermat kendala-kendala dalam pengembangan unit usaha yang selama ini belum optimal, yaitu: penyewaan molen. Di sisi lain, respon positif juga nampak dari komitmen serius juga ditunjukkan oleh pengurus BUM Desa, khususnya Juariati selaku direktur dan Supiansyah yang menjabat sebagai sekretaris BUM Desa, semakin membangun optimisme perubahan dalam tata kelola kelembagaan dan bisnis BUM Desa Karya Bia.

Melalui Visi Perubahan yang dirancang bersama, yaitu **“Hutan Desa Long Bia dikelola melalui Penguatan Komoditas Unggulan dan Pengembangan Wisata untuk Kesejahteraan Desa”**, Pemdes memiliki komitmen untuk

melakukan penguatan kebijakan dalam RPJM Desa yang mendukung pengembangan ekonomi hijau, berbasis komoditas unggulan desa, yaitu: gaharu, rotan dan komoditas agroforestri (durian, duku, langsung, dan kopi) serta wisata berbasis sumber mata air. Sedangkan BUM Desa akan melakukan penguatan kelembagaan dan penyiapan kebutuhan untuk pengembangan bisnis.

Jalan masih cukup Panjang untuk BUM Desa Long Bia, namun dengan semangat yang kuat dan peluang bisnis yang terbuka lebar, maka Long Bia bisa menjadi pelari cepat. Membangun kebijakan desa yang mendukung, khususnya dalam pengembangan sektor pertanian dan pengelolaan hutan, serta membenahi tata kelola kelembagaan BUM Desa, menjadi pintu masuk menuju gerbang pembangunan hijau di Desa Long Bia



Long Lasan: Meniti Jalan untuk Desa

Desa Long Lasan terletak di hulu Sungai Kayan, meski bukan desa paling hulu, akses menuju desa ini juga dapat ditempuh dengan menyusuri Sungai Kayan. Sama seperti desa lainnya di hulu Kayan, Long Lasan juga memiliki gagasan perubahan untuk masa depan desanya. Sadar akan kekayaan dan potensi alam yang dimilikinya, Desa Long Lasan memiliki gagasan untuk mengembangkan ekonomi desa melalui budidaya kopi berbasis hutan desa. Melalui proses dialog dan percakapan bersama IRE Desa Long Lasan telah mencoba menyusun peta jalan (roadmap).

Mimpi besar Desa Long Lasan tidak berhenti pada ide. Melalui proses pembelajaran dan diaog bersama IRE, Visi tersebut kemudian diupayakan untuk menjadi konkret dalam sebagai target dan tahapan kegiatan tahunan hingga akhir periode perencanaan (RPJM Desa). Harapannya, dokumen perencanaan yang disusun dapat menjadi kompas gerak bagi desa dalam melaksanakan pembangunan. Proses penyusunan ini juga turut memperkuat kerja sama antar aktor desa. Semua elemen terlibat aktif, mulai dari Kepala Desa, Sekretaris dan perangkat desa, BPD, hingga Pendamping Desa, menciptakan sinergi dalam perencanaan.

Untuk mencapai impian desa tersebut, Long Lasan dihadapkan pula pada tantangan pengembangan lembaga ekonomi lokal BUM Desa. Memang tidak mudah untuk menemukan mereka yang mau memulai dan merintis dari awal. Namun, meski demikian, komitmen desa untuk terus merintis dan mengembangkannya masih menjadi salah satu fokus yang mengemuka. Selain BUM Desa, Long Lasan juga menunjukkan komitmen kuat untuk mengembangkan lembaga ekonomi lainnya, yaitu Koperasi dan UMKM.

Lebih menarik lagi, dengan adanya potensi besar dari Perhutanan Sosial dan mimpi desa mengembangkan kopi berbasis hutan, Long Lasan punya peluang besar untuk membentuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). KUPS ini bisa menjadi kunci untuk mengelola dan memanfaatkan hutan desa secara optimal.

Komitmen Desa Long Lasan untuk mewujudkan mimpi dan memperkuat lembaga ekonomi desa semakin terbuka peluangnya dengan adanya masa perpanjangan kepala desa dari enam menjadi delapan tahun. Perpanjangan masa kepemimpinan juga diharapkan menjadi perpanjangan komitmen desa untuk melaksanakan peta jalan impian yang mereka gagas bersama. Untuk mewujudkannya, diperlukan upaya penataan dan pembenahan yang terus berjalan. Desa Long Lasan saat ini masih terus melanjutkan upaya pembenahan, meniti jalan perbaikan untuk desa yang lebih mandiri, demokratis, inklusif dan berkelanjutan. Belajar, berbenah dan bergerak melalui penguatan ekosistem demokrasi lokalnya.



**Long Peso: Pemdes Aktif, BUM
Desa Produktif**

Desa Long Peso menjadi “kiblat” bagi desa-desa lainnya, khususnya desa yang ada di Kecamatan Peso. Gaya kepemimpinan kultural yang dibangun oleh Pulinop sebagai Kepala Desa, terbukti mampu menggerakkan birokrasi Pemdes serta lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, termasuk BUM Desa yang telah menjalankan beberapa unit usaha melalui kerja sama dengan perusahaan.

Pemerintah Desa dan BUM Desa Long Peso menjadi peserta pelatihan yang paling aktif mengikuti serangkaian kelas belajar dalam program ini. Sejak awal, Long Peso bermimpi **“Menjadi Desa Mandiri Pangan berbasis Pengelolaan Perhutanan Sosial yang Lestari”**. Desa Long Peso percaya dengan aset penting berupa kawasan perhutanan sosial seluas kurang lebih 4.164 hektar, bila dikelola dengan tepat akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat desa. Salah satu yang ingin diwujudkan adalah peningkatan produksi dan pemasaran buah-buahan hutan, serta pengembangan wisata desa.

Upaya mewujudkan mimpi tersebut sudah mulai dibangun secara perlahan oleh Pemdes dan BUM Desa. *Pertama*, di tingkat pemerintah desa dan BPD terus berbenah mulai dari menata kebijakan dalam dokumen RPJM Desa yang awalnya masih normatif menjadi lebih sensitif untuk mendukung pengelolaan SDA secara lestari (RPJM Desa hijau), hingga menyusun peraturan desa tentang pengelolaan sampah guna membangun komitmen dasar masyarakat desa untuk peduli terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan sebagai modal awal membangun wisata desa.

Kedua, BUM Desa Sinar Peso menjadi BUM Desa yang relatif berjalan paling baik diantara BUM Desa lainnya di Lanskap Kayan, yang ditunjukkan dari adanya kelembagaan yang sudah terbentuk dan bisnis penyediaan jasa

transportasi angkutan karyawan Perusahaan Kayan Hydro Energy (KHE) yang beroperasi di Long Bia Kelas belajar dan pendampingan berfokus pada penguatan legalitas bisnis, membangun tata kelola yang demokratis (partisipatif, transparan dan akuntabel) serta penyusunan rencana usaha yang berbasis pada pengembangan aset dan potensi SDA. Usaha yang serius dari Purneli selaku Direktur BUM Desa atas dukungan Kepala Desa, menjadikan BUM Desa Sinar Peso memiliki sertifikat badan hukum dan membangun *Memorandum of Understanding (MoU)* sebagai legalitas dalam menjalankan bisnis.

Saat ini Pemerintah Desa dan BUM Desa sedang berupaya untuk mengembangkan bisnis yang berbasis pengelolaan SDA secara lestari, diantaranya: peningkatan produksi pertanian padi, perkebunan buah lay dan durian, peternakan babi, ekowisata air terjun hingga pengembangan UMKM dengan komoditas rotan hutan. Sayangnya, di tengah upaya serius membangun mimpi tersebut, Pulinop harus “berpulang” sehingga berdampak cukup serius bagi seluruh staf Pemdes maupun BUM Desa di Long Peso. Namun, pondasi utama telah diletakkan dengan baik, yaitu: sistem dan kelembagaan yang kuat, sehingga secara perlahan Pemdes dan BUM Desa mulai kembali bangkit untuk meneruskan mimpi Pulinop yang sangat besar untuk Desa Long Peso.



Lepak Aru: Urgensi Memperkuat Partisipasi

Desa Lepak Aru merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah hulu Sungai Lanskap Kayan, dengan luas sekitar 40.000 ha dan dihuni oleh kurang lebih 400 jiwa. Sama seperti desa-desa di Hulu Kayan lainnya, Lepak Aru sebenarnya memiliki berbagai potensi sumber daya alam dan potensi kehutanan yang melimpah. Dalam konteks pelaksanaan program, partisipasi dan intensitas desa dalam mengikuti proses pembelajaran dan ruang percakapan desa memang masih belum terbangun. Karenanya, belum banyak interaksi dan cerita yang terekam bersama Desa Lepak Aru.

Terlepas dari hal tersebut, meski keterlibatan dan partisipasi desa belum cukup signifikan dalam proses pembelajaran bersama, namun keberadaan Desa Lepak Aru tetap penting dan harus di rekognisi sebagai bagian tak terpisahkan dari Lanskap Kayan. Selama program berjalan, IRE juga berupaya untuk terus membangun dialog dan merangkul desa-desa di Lanskap Kayan untuk berbagi dan belajar bersama. Namun, IRE memahami bahwa setiap desa memang memiliki kompleksitas dan tantangan yang berbeda. Sehingga, meski interaksi bersama Desa Lepak Aru belum berjalan begitu intensif, adanya embrio ruang pembelajaran yang telah berkembang diharapkan menginspirasi desa untuk terlibat lebih intensif berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dan ruang percakapan desa.



Long Bang Hulu: Ingin Mandiri dan Lestari dengan Apa yang Kita Miliki

Bagi Desa Long Bang Hulu, sungai dan hutan bukan hanya tempat mereka tinggal, tapi juga ekosistem kehidupan yang menghidupi dari generasi ke generasi. Bicara soal impian desa, Long Bang Hulu turut merangkai mimpi melalui dialog bersama IRE. Sebuah gagasan lahir sebagai proyeksi untuk dapat menjadi mandiri. Pemerintah Desa Desa Long Bang Hulu menuliskan Desa yang Lestari dengan Ekosistem Sungai dan Hutan yang Terjaga, serta Pengelolaan Sampah berbasis Masyarakat. Gagasan ini tidak muncul tiba-tiba melainkan dari kesadaran mereka akan kekayaan alam desa dan kebutuhan mendesak untuk melindunginya. Desa Long Bang Hulu mengelola kawasan Perhutanan Sosial seluas 1.518 hektar, yang menghidupi 146 Kepala Keluarga.

Hasil alam Desa Long Bang Hulu cukup melimpah, mulai dari karet, lada, durian, hingga perikanan air tawar. Long Bang Hulu bahkan memiliki mata air yang potensial untuk usaha air kemasan, itulah salah satu gambaran proyeksi pengelolaan masa depan yang hadir dalam percakapan desa. Meski demikian, jalan yang dihadapi tidak mudah, Desa Long Bang Hulu dihadapkan pada tantangan ekspansi perusahaan sawit dan air kemasan yang membatasi wilayah kelola warga. Adanya masalah batas desa yang belum jelas serta gangguan air bersih akibat aktivitas industri juga menjadi tantangan nyata.

Meski tantangan di depan mata, namun semangat pemerintah desa untuk berpartisipasi dalam proses belajar sangat nyata. Jarak yang cukup jauh dari Hulu ke Tanjung selor bukan halangan untuk dapat terhubung bersama ruang percakapan desa. Partisipasi aktif dalam kegiatan pelatihan adalah salah satu bukti bahwa pemerintah Desa Long Bang Hulu mengupayakan perubahan untuk masa depan. Mereka belajar memetakan potensi dan merumuskan visi, sehingga impian yang tertuang dalam dokumen perencanaan dapat menjadi milik bersama, bukan sekadar dokumen administrasi.

BUM Desa Long Bang Hulu memang belum terbentuk, namun, semangat kolaboratif antara Pemerintah Desa, tokoh masyarakat, dan warga sangat terasa. Dalam musyawarah yang difasilitasi oleh IRE, berbagai ide dan gagasan usaha muncul dari masyarakat, mulai dari pertanian, perkebunan, hingga pengolahan hasil hutan dan melihat peluang kerja sama antar desa di masa depan. Pemerintah Desa, masyarakat, dan tokoh lokal mulai mengkonkretkan impian mereka dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, tentu saja ini belum selesai dan menyisakan PR besar di depan mata. Tapi hasil pembelajaran yang sudah dilalui adalah modalitas penting untuk Long Bang Hulu berbenah diri, supaya mandiri dan lestari dengan apa yang mereka miliki.



Long Bang: Hutan dan Optimisme Membangun Desa

Sama seperti desa lainnya, Desa Long Bang juga memiliki impian dan gagasan untuk memajukan desanya. Impian itu juga tidak terlepas dari apa yang mereka miliki dan yakini sebagai kekayaan dan potensi, yakni: Hutan. Desa Long Bang memiliki izin pengelolaan hutan desa seluas 1.612 Ha. Bagi masyarakat Long Bang, hutan bukan sekedar tempat tinggal melainkan harta karun yang menyimpan banyak kekayaan alam yang menghidupi. Hutanlah yang menjadi ruang hidup dan sumber penghidupan. Karena itulah, pemerintah Desa Long Bang memiliki komitmen dalam pembenahan dan penguatan perencanaan desa, yang tidak hanya berpihak pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga pada kelestarian alam.

Melalui diskusi dan dialog bersama dalam pelatihan dan ruang percakapan desa, Long Bang menggagas impian tentang “Pengembangan Budidaya Kakao Berbasis Hutan Desa sebagai Komoditas Unggulan Desa Long Bang.” Adanya mimpi dalam mengembangkan komoditas unggulan ini memberi harapan besar bagi desa dan masyarakat untuk meningkatkan pengembangan ekonomi lokal yang berkeadilan dan berkelanjutan. Desa cukup optimis untuk mencapai perubahan. Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh pengurus BUM Desa, baik itu direktur, bendahara, maupun pengawas yang memiliki ketertarikan dan keinginan untuk mengembangkan usaha yang mengacu pada pemanfaatan hasil hutan. Namun prosesnya memang masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk soal kelembagaan dan kapasitas dalam pengembangan usaha. Untuk merespon hal tersebut, Desa Long Bang terus berbenah dan melakukan perbaikan-perbaikan.

Langkah-langkah penguatan tampak dari pola penyusunan Perubahan RPJM Desa untuk tahun periode 2019 - 2027 termasuk langkah untuk mewujudkan pembangunan hijau di desa. Jalan untuk mewujudkan impian desa tidak terlepas dari tantangan dan dinamika. Perubahan yang memang tidak bisa terjadi secara instan, namun pemerintah desa cukup terbuka dalam membangun dialog dan percakapan desa. Hal ini tentu saja menjadi energi dan optimisme untuk terus berbenah dan melangkah. Desa Long Bang terus menghidupkan optimismenya sambil terus berbenah dan melangkah.



Long Lembu: Menjaga Harapan, Terus Berjalan

Untuk mewujudkan perubahan di desa, kelestarian sumber daya alam dan hutan begitu krusial untuk dijaga, begitupula harapan dan tekad untuk terus belajar dan bergerak. Setidaknya itulah yang tercermin dari Desa Long Lembu. Andreas, sang Kepala Desa muda, sejak awal telah menunjukkan komitmen dan semangat dalam berproses di setiap tahapan dan ruang pembelajaran. Meski masih dihadapkan pada tantangan dalam menggerakkan potensi dan sumber daya alamnya, Kepala Desa termuda di Lanskap Kayan ini memiliki proyeksi pengembangan ekonomi lokal yang lahir dari proses dialog bersama. Ia menyadari bahwa penguatan ekonomi desa dapat diungkit melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Dari diskusi ke diskusi, harapan dan tekad desa untuk dapat melakukan pengembangan ekonomi lokal melalui BUM Desa masih menjadi salah satu concern utama. Ada potensi atau peluang dari pengembangan unit usaha jasa lingkungan, khususnya aspek layanan dasar air bersih. Sumber air bersih di Desa Long Lembu menjadi salah satu potensi yang dibanggakan desa. Selain daripada itu, terdapat potensi lain berupa penjualan bibit babi dan pakan ternak yang dapat dijadikan sebagai komoditas unggulan desa.

Meski demikian, kondisi di lapangan menunjukkan sulitnya mencari dan menemukan mereka yang mau berkiprah dan merintis BUM Desa. Namun, Desa Long Lembu tidak kehilangan harapan, komitmen Pemdes untuk mendorong terwujudnya perubahan bagi Desa Long Lembu terus diupayakan melalui keterlibatan aktif pada kegiatan-kegiatan pelatihan dan ruang percakapan desa. Hal ini tampak bukan hanya dari partisipasi kepala desa dalam pelatihan, tetapi juga dari tindak lanjut *pasca pelatihan*, seperti dialog dan asistensi bersama tim fasilitator.



Long Telenjau: Semangat Berbenah, Berubah Lebih Terarah

Desa Long Telenjau diberkahi potensi sumber daya alam yang signifikan, terutama di sektor perhutanan sosial. Mereka memiliki mimpi untuk mengembangkan sektor-sektor produktif lokal tersebut. Selama proses pembelajaran bersama IRE, desa ini memulai proses perencanaan dan penguatan kapasitas dengan memfokuskan diri pada pengelolaan sumber daya alam dan potensi lokal. Dalam setiap proses pembelajaran, Sekretaris Desa Long Telenjau cukup aktif untuk berpartisipasi membangun dialog dan merancang mimpi bersama.

Ada beberapa impian dan rencana yang Long Telenjau hidupkan dalam ruang-ruang percakapan desa, diantaranya (1) Adanya rencana pengembangan unit usaha pengelolaan air bersih desa, khususnya yang berkaitan dengan sistem retribusi dan tata kelola distribusi. (2) Upaya mendorong optimalisasi fungsi BUM Desa agar tidak hanya aktif secara administratif, tetapi juga produktif secara ekonomi. (3) Penguatan kapasitas pemerintah desa dalam penyusunan dokumen perencanaan (RPJM Desa) agar lebih adaptif terhadap potensi dan kebutuhan desa.

Desa Long Telenjau menyadari bahwa impian-impian itu dapat diraih jika desa melakukan pembenahan dan perbaikan, salah satunya dari sisi perencanaan pembangunan desa. Kehadiran Pak Samuel, Sekretaris Desa Long Telenjau dalam kelas-kelas pelatihan yang diselenggarakan oleh IRE menunjukkan adanya komitmen nyata untuk belajar dan membenahi desa.

Sekretaris Desa cukup aktif dalam proses dialog perencanaan, khususnya dalam forum-forum pembahasan penguatan dokumen RPJM Desa. Respon yang cepat dan keterbukaan dalam menerima metode perencanaan yang ditawarkan menjadi modal penting dalam meningkatkan kapasitas

kelembagaan desa ke depan. Dari berbagai proses dialog dan pembelajaran, terdapat beberapa pembelajaran baik yang memperkuat modal semangat Long Telenjau: (1) Menguatnya kesadaran awal mengenai pentingnya pengelolaan air bersih sebagai potensi usaha desa yang bisa dikembangkan melalui BUM Desa; (2) Peningkatan pemahaman teknis perencanaan pembangunan desa oleh Sekretaris Desa, khususnya terkait penyusunan RPJM Desa yang responsif terhadap sumber daya lokal; (3) Adanya keterhubungan antara Pemerintah Desa Long Telenjau dengan jejaring pendampingan IRE dalam dua fase terakhir, yang membuka peluang dukungan lanjutan di masa mendatang. Kini Desa Long Telenjau terus berbenah, menata kebijakan dan kelembagaan agar impian yang direncanakan kian terarah dan semakin jelas wujudnya.



**Long Tunggu: Jalan Panjang
Kembangkan Ekowisata**

Desa Long Tunggu juga menjadi salah satu desa yang aktif dalam mengikuti program Akademi SIGAP. Meski harus menempuh perjalanan dengan perahu motor, komitmen Kades, Sekdes, dan Staf desa untuk hadir dalam kelas-kelas belajar sangatlah kuat. Dalam beberapa tahap perjalanan membangun desa, IRE juga berkesempatan menemani Desa Long Tunggu baik dalam melakukan *review* dan revisi perencanaan pembangunan desa maupun penguatan kapasitas dalam pengelolaan usaha berbasis sumber daya alam. Mimpi Desa Long Tunggu cukup sederhana, yakni mewujudkan desa maju dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Ini mencakup terpenuhinya kebutuhan air bersih, fasilitas umum yang memadai, terdapat rumah produksi hasil alam, peternakan babi dan ikan, serta wisata air terjun sebagai produk unggulan desa, jalan desa dan pertanian yang layak, hingga akses internet yang lancar.

Dari banyak mimpi yang ingin direalisasikan, Long Tunggu memiliki prioritas program yang hendak diwujudkan. Salah satunya adalah pengelolaan sumber daya air untuk obyek wisata dan pemenuhan layanan air bersih. Dalam rencananya, usaha berbasis pengelolaan SDA ini akan diserahkan pengelolaannya kepada BUM Desa, meski kelembagaannya harus diperkuat. Kepala Desa Long Tunggu, Lahang Ibo, menyadari bahwa penguatan BUM Desa penting dilakukan untuk kesiapan BUM Desa mengelola usaha pemanfaatan air bersih. Pemdes mulai memahami pentingnya *roadmap* untuk mengelola sumber daya alam dalam perencanaan desa.

Momentum penting perubahan RPJM Desa Long Tunggu Tahun 2019-2027 dimanfaatkan untuk merancang peta jalan menuju tata kelola aset dan potensi SDA secara berkelanjutan. **Pertama**, Pemdes secara sadar menjadikan pengembangan potensi air bersih dan wisata alam menjadi program prioritas untuk tambahan dua tahun masa jabatan kepala desa dan tertuang dalam dokumen Perubahan RPJM Desa Tahun 2019-2027. **Kedua**, dalam forum Musrenbang Kecamatan Peso Hilir Tahun 2025, Long Tunggu juga mengusulkan pembangunan sumber air bersih ini menjadi salah satu Daftar Usulan Program Kegiatan Prioritas untuk penyusunan RKPD kabupaten tahun 2026. **Ketiga**, inisiatif untuk membangun ruang percakapan di desa mengenai rencana pengembangan wisata alam juga mulai dilakukan melalui forum Pelatihan Pengembangan Wisata Air yang diinisiasi oleh Pemdes Long Tunggu. Meski masih dini, namun ini menunjukkan bahwa Pemdes mulai mensosialisasikan rencana pengembangan wisata alam dan air bersih kepada berbagai pemangku kepentingan di desa.

Dalam menjembatani antara proses politik dan teknokrasi perencanaan di Long Tunggu, Sekretaris Desa Meiriflin Ivong memainkan peran penting selama ini. Sekdes perempuan yang dikenal tangguh, tekun, dan cermat senantiasa menunjukkan keaktifannya dalam kelas-kelas belajar selama ini. Beliau juga lah yang mengawal kerja-kerja teknokratik dalam proses perubahan RPJM Desa untuk pengelolaan SDA lestari di Desa Long Tunggu. Di samping itu, selama ini desa ini juga sangat terbuka dengan kami, bahkan tidak jarang inisiatif untuk konsultasi maupun peningkatan kapasitas justru muncul dari desa sendiri.



**Naha Aya: Pertanian
Berkelanjutan untuk
Kelestarian Alam**

Desa Naha Aya merupakan salah satu desa yang cukup aktif dalam mengikuti proses demi proses kegiatan pada program Akademi SIGAP selama ini. Selaras dengan prinsip pembangunan hijau, Naha Aya memiliki mimpi mengembangkan pertanian berkelanjutan. Libang Asan, Kepala Desa Naha Aya, adalah sosok yang mengawal proses ini. Kehadirannya dalam kelas-kelas belajar kebersamai perangkat desa, BPD, dan BUM Desa menjadi wujud nyata komitmen desa dalam upaya meningkatkan kapasitasnya. Komitmen untuk mengembangkan pertanian juga dibuktikan dengan dimasukkannya program tersebut dalam perubahan RPJM Desa Naha Aya. Di tingkat Kecamatan, usulan Naha Aya dalam Musrenbang Kecamatan Peso Hilir juga banyak menyentuh program-program pengembangan pertanian.

BUM Desa Naha Aya juga terbilang cukup aktif dalam menjalankan usahanya. Beberapa usaha yang dijalankan, antara lain tambatan perahu, layanan air bersih, dan depo air minum. Meski demikian, BUM Desa Naha Aya masih membutuhkan penguatan legalitas kelembagaan hingga membenahan tata kelola. Kelas belajar yang diselenggarakan dimanfaatkan untuk memperkuat dua hal ini. Pada 2025 ini, BUM Desa Naha Aya yang terdaftar dengan nama BUM Desa Kayan Indah Naha Aya telah memiliki sertifikat badan hukum dengan nomor AHU-00961.AH.01.33.TAHUN 2025. Direktur BUM Desa Kayan Indah Naha Aya, Usat Wan, juga memiliki semangat dan komitmen yang luar biasa untuk terus tumbuh dan berbenah. Baginya, BUM Desa Karya Indah masih harus membenahi aspek kelembagaan, tata kelola usaha, kemitraan lokal, hingga pengembangan usaha BUM Desa.

Di aspek kelembagaan, BUM Desa masih perlu melakukan pengisian jabatan sekretaris dan memperkuat pencatatan keuangan serta administrasi. Ini penting agar BUM Desa ke depan mampu mencatatkan usahanya dengan baik sehingga dapat menghasilkan PADes. Selain itu, kerjasama BUM Desa dengan KUPS Jasling dalam pengelolaan depo air juga menjadi contoh baik kemitraan BUM Desa dengan kelompok masyarakat. Kehadiran perusahaan yang beroperasi di wilayah Naha Aya juga dapat menjadi modal untuk membangun kemitraan dengan perusahaan sejauh pembenahan kelembagaan dapat dilakukan.

Long Beluah adalah desa yang “besar” dan “kaya”. Bukan hanya besar karena luasan areanya, tapi juga besar dengan basis keberagaman penduduk dan sumber dayanya. Keberagaman Desa Long Beluah itulah juga yang menjadikannya “kaya”. Kaya akan potensi sumber daya manusia, budaya, etnisitas hingga sumber daya alam dan hutannya. Desa Long Beluah lebih dikenal orang dengan Kampung Bhayangkara. Letaknya yang strategis untuk perdagangan, didukung juga melalui ketersediaan SDA dalam kawasan hutan yang menyimpan berbagai potensi lokal mulai dari hasil kayu, buah-buahan lokal hingga hasil hutan bukan kayu seperti rotan, bajaka, ginseng dll. Long Beluah memiliki izin pengelolaan Hutan Desa seluas 1.598 hektar. Desa ini juga memiliki arah pengembangan ekonomi yang difokuskan pada berbagai aktivitas, seperti pariwisata edukasi, penyediaan layanan air bersih, dan pengelolaan limbah kayu.

Di bawah kepemimpinan Pak Yusran, Desa Long Beluah cukup aktif dan partisipatif dalam proses pembelajaran. Meski dihadapkan pada berbagai dinamika dan tantangan dalam berdesa, ruang-ruang percakapan desa dan dialog bersama kerap kali menjadi jembatan dan refleksi untuk terus menghidupkan harapan dan membangun gagasan perubahan. Partisipasi Pemdес, BPD dan BUM Desa dalam kelas belajar menunjukkan adanya niat baik dalam membenahi desa. Dibalik upaya itu, menjahit sinergitas antar aktor disadari masih menjadi PR besar di Desa Long Beluah. Terlepas dari tantangan tersebut, Pemdес dan BPD Long Beluah cukup aktif dan berkomitmen untuk membenahi kebijakan di desa. Salah satunya melalui inisiasi peraturan desa yang berorientasi pada perlindungan sumber daya alam. Mereka meyakini bahwa salah satu syarat mendorong perubahan dan kesejahteraan adalah dengan memastikan perlindungan dan kelestarian hutan.

BUM Desa Senguyun Long Beluah juga terhubung dalam proses pembelajaran dan ruang percakapan desa, meski sempat cukup aktif dan menggagas rencana bersama, adanya tantangan kelembagaan menyebabkan progress gerak BUM Desa kurang berjalan sesuai harapan bersama. Tantangan-tantangan ini juga terus didialogkan melalui kelas belajar Akademi SIGAP dan ruang-ruang percakapan desa, untuk mencari alternatif cara dan terus berbenah menjahit sinergitas. Meski tidak selalu mudah, tapi upayanya terus diasah.

Upaya membenahi dan menata kelembagaan ekonomi lokal desa (BUM Desa) juga selaras dengan upaya dalam pengembangan LPHD dan KUPS. Kelembagaan LPHD Long Beluah yang memiliki beberapa KUPS diproyeksikan fokus pada beberapa sektor antara lain *Agroforestry*, Air Bersih, Ekowisata dan HHBK. Hal inilah yang sebenarnya potensial untuk dikembangkan secara kolaboratif bersama BUM Desa. Selain itu, Long Beluah juga menjalankan Program TAKE melalui pengembangan pertanian berkelanjutan atau pengelolaan sampah. Kini, Desa Long Beluah terus melangkah untuk berbenah, PR untuk menjahit sinergitas dan kolaborasi antar aktor dan lembaga di desa juga menjadi salah satu fokusnya.



Long Sam: Hutan Lestari, Desa Mandiri

Desa Long Sam terus berbenah dan memantapkan langkah menuju kemandirian desa berbasis potensi lokalnya. Desa yang dikenal sebagai sentra penghasil buah durian dan kelengkeng ini terus menunjukkan progressnya dalam menata kebijakan dan memperkuat kelembagaan ekonomi lokal. Selain buah-buahan, Desa Long Sam juga kaya akan berbagai SDA, mulai dari sumber mata air, sumber daya hutan, sumber daya pertanian dan perkebunan hingga sumber daya perikanan sungai.

Habibie, kepala Desa Long Sam, sejak awal menunjukkan semangat dan optimismenya dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dan hutannya. Ia percaya bahwa kekayaan hutan yang dimiliki Long Sam dapat memberi kemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat, hanya jika dikelola dengan partisipatif dan berkelanjutan. Karena itulah, Long Sam juga mendukung penguatan kelembagaan ekonomi lokal desa untuk menggerakkan pengembangan ekonomi lokal berbasis perhutanan sosial, baik melalui BUM Desa maupun LPHD dan KUPS. Melalui program Akademi SIGAP, Pemdes dan BUM Desa Long Sam telah aktif membangun dialog dan gagasan pengembangan desa yang lestari.

Upaya Pemdes Long Sam menghadirkan “Desa Lestari” tentu bukan tanpa tantangan, desa mengalami pencemaran terhadap sumber mata air sungai *Beletung* yang diduga akibat aktivitas perusahaan sawit. Penggunaan pupuk kimia secara masif membawa dampak serius bagi keberlangsungan sumber mata air yang menyebabkan keruh, hingga mengancam kesehatan masyarakat.

Berangkat dari keresahan tersebut, Pemdes dan BPD Long Sam tergerak untuk memperkuat kapasitasnya dalam pembuatan kebijakan desa. Inisiasi pembuatan Perdes perlindungan dan pemanfaatan sumber mata air sungai Beletung dan Perdes pengelolaan sampah pun digagas melalui ruang pembelajaran dan percakapan bersama IRE. Pemdes Long Sam menyadari bahwa kelestarian sumber daya alam dan hutan adalah modalitas utama untuk menyongsong ekonomi yang berkelanjutan. Desa akan mampu mandiri kalau hutannya terjaga dan lestari.

Selain pemdes dan BPD, BUM Desa Cahaya Long Sam yang digerakkan oleh seorang guru SD, yakni Baharuddin, juga terus berbenah. BUM Desa Long Sam cukup aktif terhubung melalui kelas belajar dan asistensi bersama IRE. Pengembangan dan pengelolaan *agroforestry* menjadi salah satu gagasan dan impian BUM Desa. Hal ini sebetulnya sejalan dengan upaya LPHD melalui pemanfaatan Hutan Desa seluas 322 Ha. LPHD Long Sam sudah memiliki 7 KUPS yang beberapa diantaranya telah menghasilkan produk unggulan seperti madu kelulut, hingga buah-buahan lokal. Bahkan, baru-baru ini telah muncul inisiatif pembentukan KUPS perempuan yang kini telah mulai berjalan.

Perjalanan BUM Desa Long Sam memang masih dihadapkan pada tantangan pengembangan usaha dan tantangan kelembagaan. Namun hal yang patut diapresiasi adalah semangatnya untuk terus berbenah dan menyalakan harapan. Ada peluang kerjasama antara LPHD dan BUM Desa yang potensial dikembangkan ke depan, hal inilah yang perlu diperkuat dan dibenahi sebagai upaya kolaborasi yang dapat memperluas manfaat bagi masyarakat.



Mara Hilir: Yang Muda, Yang
(Memilih) Bergerak untuk Desa

Ada yang berbeda dari Desa Mara Hilir, sejak awal perjumpaan dalam proses pembelajaran dan ruang-ruang percakapan desa, ada seorang pemuda yang tidak pernah absen terlibat dan bersuara. Adalah Anggun, seorang pemuda desa yang dimandatkan tugas sebagai perangkat desa. Semangatnya untuk terlibat dalam ruang percakapan desa bukan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban penugasan semata. Bersama staf dan perangkat desa lainnya, jarak yang cukup panjang dan medan yang cukup menantang bukanlah persoalan untuk dapat terhubung dalam ruang pembelajaran. Saat ini, Desa Mara Hilir sendiri dipimpin oleh Bapak Sofian sebagai Pj. Kepala Desa menggantikan Bapak Sahadan yang meninggal pada tahun 2024 lalu.

Desa Mara Hilir memiliki fokus untuk dapat mewujudkan kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu fokus kesejahteraan yang ingin dicapai yakni terpenuhinya kebutuhan dasar hidup masyarakat baik pangan, sandang maupun papan. Pemenuhan kebutuhan pangan lestari menjadi perhatian Pemdes yang juga sejalan dengan program prioritas daerah. Komitmen ini bukan sekedar jargon belaka, tumbuh pula komitmen anggaran untuk penguatan di sektor pertanian yang telah nampak dalam dokumen perencanaan Desa.

Masyarakat Mara Hilir memang menyandarkan sumber mata pencaharian dari sektor pertanian pangan dan perkebunan. Terdapat beragam potensi perkebunan buah lokal yang dapat menopang pengembangan ekonomi lokal desa. Sadar akan hal ini, Pemdes dan BPD secara proaktif membawa topik perlindungan lahan pertanian pangan kedalam ruang-ruang percakapan di kegiatan program Akademi SIGAP.

Ancaman alih fungsi lahan untuk kepentingan non pangan menjadi salah satu perhatian Pemdes karena dampaknya secara langsung akan mengganggu ketahanan dan kedaulatan pangan desa. Mereka mulai belajar dan menginisiasi pembuatan dokumen draft Perdes tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan dan Pengelolaan Sampah.

Pemdes dan BPD juga terus berupaya mengajak masyarakat desa untuk aktif berpartisipasi pada kelembagaan yang ada di desa. Proses identifikasi aset potensi juga telah menghimpun beberapa peluang usaha yang dapat dikembangkan oleh BUM Desa, seperti wisata air terjun dan agrowisata komoditi pangan dan perkebunan buah. Keikutsertaan tokoh-tokoh muda desa potensial juga dilibatkan oleh Pemdes dengan harapan bisa menjadi aktor utama yang akan terus berbenah menggerakkan kelembagaan ekonomi yang ada di Desa nantinya. Proses belajar memang masih panjang, berbagai PR dalam penguatan tata kelola kelembagaan dan pengembangan potensi lokal juga masih menjadi tantangan, namun kehadiran para pemuda yang mau dan bergerak untuk terus belajar mengupayakan perubahan adalah sebuah modalitas dan pondasi untuk keberlanjutan proses penataan dan perbaikan.



Mara I: Desa Pembelajaran yang Mau Perubahan

Bagi Desa Mara I, terhubung dalam kelas belajar Akademi SIGAP bukan hanya kegiatan formal semata melainkan ruang menghidupkan gagasan dan imajinasi perubahan desa. Nuh Uda, Kepala Desa Mara I sejak awal sudah menunjukkan semangat dan komitmennya untuk melakukan pembenahan desa. Baginya perubahan dapat terjadi hanya jika desa mau terus belajar membenahi diri. Mara I memiliki visi dan gagasan tentang desanya: “Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih guna mewujudkan Desa Mara I yang adil, makmur, sejahtera dan bermartabat” adalah tujuan yang ingin mereka upayakan.

Impian dan gagasan itu berangkat dari berbagai sumber daya dan potensi lokal yang mereka punya. Hal ini tidak terlepas pula dari kesadaran mereka tentang adanya berbagai potensi desa yang dapat dikembangkan, seperti wisata alam air terjun Pong Mara, wisata budaya dayak yang menjadi ikon kultural bagi suku dayak Kenyah Lepu Tau maupun inovasi agrowisata perkebunan buah yang bisa dikemas menjadi ide usaha terintegrasi.

Namun, kondisi tata kelola pemerintahan dan kelembagaan ekonomi lokal desa masih menjadi tantangan untuk mewujudkan perubahan desa. Ternyata, menemukan dan mencari mereka yang mau merintis BUM Desa bukanlah hal yang mudah, hal inilah yang menjadi salah satu fokus perbincangan desa. Meski kerap kali dihadapkan pada tantangan tersebut, Nuh Uda dan perangkat pemerintah Desa Mara 1 terus menjaga komitmen dan antusiasmenya untuk aktif berpartisipasi dalam ruang-ruang pembelajaran desa.

Mereka mendorong pelibatan SDM potensial dalam kegiatan pelatihan dan ruang - ruang percakapan yang diselenggarakan oleh IRE pada program Akademi SIGAP. Pemetaan potensi dan gagasan pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa terus didialogkan dan ditata menjadi bagian penting dari agenda perubahan desa, untuk kemudian secara paralel terus memperjuangkan inisiasi dan pengembangan pengelolaan sumber daya alam dan potensi lokal desa.

Desa Mara I adalah pembelajar yang mau mengupayakan perubahan, hal ini tercermin pula dari adanya komitmen Pemdes dan BPD dalam memperkuat perlindungan sumber daya dan aset desa. Mengingat mayoritas warga desa sangat bergantung pada sektor pertanian, pemdes dan BPD belajar melakukan penataan dan penguatan peraturan desa yang berorientasi pada perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dan pengelolaan sampah. Langkah ini adalah respon konkret akan adanya ancaman alih fungsi lahan yang mengancam kedaulatan pangan desa. Ditengah tantangan kelembagaan yang dihadapi, Desa Mara I terus merawat semangat belajarnya untuk berbenah menuju perubahan. Komitmen Kepala Desa dan sinergitasnya dengan BPD menjadi modalitas penting untuk melanjutkan langkah menuju desa yang lebih berdaya.



Antutan: Dari Kakao menuju
Pembangunan Hijau

Sentra pengolahan buah kakao menjadi salah satu ikonik dari Desa Antutan. Desa ini dipilih sebagai kawasan percontohan (piloting area) untuk pengembangan industri pengolahan dan pabrik kakao, berdasarkan ketersediaan sumber bahan bakunya yang melimpah. Keberadaan aset desa berupa hutan desa dan hutan kemasyarakatan yang masih terjaga juga menjadi nilai tambah yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan komoditas unggulan desa.

Antutan juga memiliki beragam potensi sumber daya alam (SDA), di antaranya potensi agroforestri seperti kakao, durian, dan rambutan; hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti gaharu, pepaya, nangka, pisang, dan mangga; serta potensi wisata alam berupa air terjun. Dengan aset dan potensi tersebut, Antutan bermimpi menjadi yang terdepan dalam pengembangan ekonomi berbasis agroforestry dan wisata.

Sejak awal, Desa Antutan memiliki semangat yang kuat untuk berpartisipasi dalam kelas-kelas belajar. Kepala Desa Antutan yakni Aminudin dan sekretaris desa Riyon, cukup intensif berpartisipasi dalam Akademi SIGAP. BUM Desa Antutan juga terus menata dan berbenah. Legalitas badan hukum menjadi modal awal, namun hal tersebut belum cukup. Pembentukan kepengurusan menjadi tantangan tersendiri, sementara sejauh ini proses perubahan yang cukup signifikan adalah pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan dan pencatatan administrasi BUM Desa. Ini tidak lepas dari semangat Pak Lukman Direktur BUM Desa, dengan menaiki sepeda motornya ia hadir selalu ke Kantor IRE untuk belajar hingga larut malam secara guna memperbaiki akuntabilitas dan transparansi BUM Desa di mata pemdes dan masyarakat.

Sebagai desa yang berada di hilir dan dekat dengan ibukota kabupaten, Antutan memiliki potensi besar sebagai sentra pemasaran produk-produk dari hulu, seperti durian, kakao, dukuh, langsung dsb. Peran ini penting untuk dimainkan mengingat dalam pembangunan berbasis kawasan baik pembangunan kawasan perdesaan maupun IAD, pembagian peran dan konektivitas antar desa menjadi penting.

Saat ini, dukungan serius dari Pemerintah Desa dalam memfasilitasi BUM Desa perlu mulai mengarah pada fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan menuju pasar yang lebih baik, mengingat potensi komoditas yang kuat dan keterampilan masyarakat dalam pengolahan sudah memadai untuk menjadi modal dasar dalam pengembangan komoditas kakao.



BAB IV

Relevansi dan Pembelajaran Program

Kehadiran mitra strategis pembangunan di Kabupaten Bulungan menjadi model kolaborasi antara pemerintah daerah dengan organisasi masyarakat sipil dalam mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kolaborasi ini tidak terlepas dari komitmen kabupaten melalui slogan “*Tenguyun Hutanku*”. Ini adalah strategi Kabupaten Bulungan untuk mengintegrasikan pembangunan kawasan perdesaan dengan perhutanan sosial sebagaimana dinarasikan dalam dokumen *Integrated Area Development* (IAD) Lanskap Kayan. Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya, IAD merupakan program terpadu untuk peningkatan kesejahteraan melalui pengembangan produk-produk unggulan di kawasan hutan (Hulu sungai Kayan) untuk mempercepat program prioritas pembangunan Kabupaten Bulungan (IAD, 2023).

Bagian ini akan menguraikan pembelajaran dari berbagai cerita perubahan yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Sejak awal kami menyadari bahwa dalam mendukung hadirnya pembangunan yang lestari di Kabupaten Bulungan, kami tidak dapat menjangkau seluruh aspek yang mendukung hal tersebut. Kami tidak bekerja sendiri. Namun, kami memberikan kontribusi peran pada arena penguatan kebijakan desa dan kabupaten untuk tata kelola yang lestari serta penguatan kelembagaan BUM Desa yang sejatinya mampu mengelola kekayaan SDA di lanskap Kayan. Setiap cerita perubahan yang tersajikan dalam bab sebelumnya menghasilkan pembelajaran penting yang kami uraikan dalam bab ini.

Mendampingi pemdes dan BUM Desa dalam kelas-kelas belajar SIGAP selama ini membuka pemahaman baru bagi kami. **Pertama**, aspek lokalitas menjadi kata kuncinya. Lokalitas yang dipahami di sini adalah aneka tata nilai sosial budaya, cara memproduksi dan kelola ekonomi, serta ekspresi kelembagaan yang khas dimiliki suatu masyarakat.

Dalam hal ini, kami bekerja bersama dengan pemerintah desa dan masyarakat yang sebagian besar adalah masyarakat Dayak yang juga mengembangkan penghidupan dari sumber daya alam di sekitar hutan. Mereka memiliki lokalitas sosial, budaya, strategi penghidupan, dan kelembagaan yang memiliki peran besar dalam menentukan perubahan. Mengutip Pujo Semedi dalam banyak studinya tentang masyarakat Dayak, mereka sejatinya adalah aktor perubahan yang beradaptasi, bernegosiasi, dan berkontribusi pada dinamika perubahan yang terjadi di sekitarnya.

Kedua, sepanjang menjalankan program ini, kami memahami pentingnya strategi menyelaraskan antara misi pelestarian/konservasi lanskap alam dengan kebutuhan masyarakat akan penghidupan dan tujuan-tujuan ekonomistik lainnya. Tak dapat dipungkiri bahwa seringkali daya tarik ekonomi ekstraktif dan perkebunan sawit lebih kuat dibandingkan aspirasi untuk mengelola sumber daya hutan yang bisa jadi lebih lambat dalam memberikan pendapatan bagi masyarakat. Hal ini juga terjadi di Lanskap Kayan dimana ekspansi perkebunan sawit yang mulai berkembang di hilir menjadi tantangan bagi pengembangan komoditas perhutanan sosial. Ada saat dimana masyarakat lokal seringkali bersedia menerima kehadiran perusahaan ekstraktif jika hal tersebut menjanjikan pendapatan yang lebih baik di masa depan (Toumbourou & Dressler, 2024). Oleh karenanya, pendekatan yang dilakukan harus mampu menjembatani upaya konservasi dengan kepentingan sosial ekonomi masyarakat lokal yang mendambakan penghidupan lebih baik.

Membumikan Pembangunan dan Pertumbuhan Hijau di Desa-Desa Lanskap Kayan

Pemerintah desa menjadi salah satu aktor strategis dalam mendorong pembangunan hijau di desa dengan segala kewenangan yang dimilikinya. Kapasitas pemerintah desa-desa di Lanskap Kayan pun cukup beragam. Ada desa yang melaju dengan inovasi pembangunan dan layanan publiknya, namun ada pula yang masih harus diperkuat kapasitas dasarnya. Namun demikian, hampir semua memiliki semangat untuk mengembangkan inovasi di desanya sesuai aset dan potensi yang dimilikinya. Idealnya, sekurang-kurangnya terdapat tiga kapasitas yang perlu dimiliki oleh pemerintah desa. Pertama, kapasitas kelembagaan yang mensyaratkan fungsi-fungsi pemerintah desa dapat berjalan sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kedua, kapasitas sumber daya manusia yang meliputi kapasitas teknis dan teknokratis untuk mengawal tata kelola pemerintahan desa dan kapasitas manajerial untuk menggerakkan partisipasi masyarakat. Ketiga, kapasitas keuangan yang erat kaitannya dengan kemampuan desa dalam membiayai program-program pembangunannya guna menopang kemandirian desa. Khusus kapasitas yang terakhir, desa membutuhkan kemampuan untuk menghasilkan pendapatan asli desa melalui kinerja lembaga ekonomi lokal yang kuat, terutama BUM Desa. Karenanya, komitmen kuat pemdes dalam mendukung lembaga ekonomi lokal dapat memberi timbal balik pada meningkatnya kapasitas keuangan desa.

Menuju Perencanaan Desa yang Bermakna

Di arena pemerintah desa, kami mulai dengan mengubah cara pandang tentang perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan desa selama ini dipandang sebatas sebagai syarat administratif belaka, sekadar untuk menggugurkan kewajiban mencairkan anggaran desa.

Hal ini menyebabkan perencanaan desa tidak lahir dari kebutuhan untuk mencapai visi dan misi desa serta mimpi perubahan yang diinginkan oleh desa. Tak hanya itu, hal ini juga menjadikan desa tidak memiliki arah kemana mereka akan membangun. Padahal, di dalamnya memuat komitmen politik kepala desa serta perangkatnya, hasil kerja teknokratik dari tim penyusun, serta proses partisipatif melalui musyawarah desa.

Proses perencanaan pembangunan yang tidak bersandar pada proses yang partisipatif dan kegagalan dalam menjabarkan aspirasi pembangunan secara teknokratik berdampak pada banyak hal. Salah satu yang paling mendasar adalah semakin lebarnya kesenjangan antara perencanaan dan implementasi program karena ketidakakuratan dalam menganalisis aset potensi dan permasalahan. Selain itu, melemahnya sinergi perencanaan antara daerah dengan desa menyebabkan ketidaktepatan tujuan dan sasaran program kabupaten ke desa. Situasi yang tidak ideal ini menyebabkan lemahnya kualitas dokumen perencanaan yang disusun oleh desa.

Selama dua tahun IRE mendampingi proses perencanaan desa-desa di Lanskap Kayan, setidaknya ada dua hal yang dapat diangkat sebagai pembelajaran dari sisi perencanaan pembangunan desa. **Pertama**, secara substantif dan teknokratis, menguatnya pengetahuan dan pemahaman mengenai dokumen RPJM Desa oleh pemerintah desa menjadi salah capaian penting mengingat selama ini RPJM Desa belum menjadi dokumen perencanaan yang ideal. Bagi mereka, pengetahuan baru semacam ini membentuk kesadaran bahwa merancang dokumen perencanaan tak serumit yang dibayangkan. Dengan terlebih dahulu memetakan aset dan potensi yang dimiliki, pemdes diajak untuk membayangkan apa mimpi perubahan yang akan dibangun selama periode perencanaan.

Mengajak pemdes dan masyarakat untuk membincangkan aset dan potensi mereka, terutama potensi sumber daya alam dapat membangun kesadaran mereka mengenai visi dan misi yang realistis, dapat diukur capaiannya, dan didasarkan pada apa yang mereka miliki serta kuasai. Hal ini menjadikan perencanaan yang dibangun menjadi lebih bermakna. Bukan sekadar rumusan yang abstrak dan sulit dipahami. Dari sini kami mengajak mereka memahami kerangka ideologi/perspektif yang mendasari perencanaan mereka, yakni ide atau gagasan tentang pembangunan hijau. Meski demikian, perlu disadari bahwa gagasan pembangunan hijau ini juga ide yang masih sangat kontestatif dan tidak ada kesepakatan baku mengenai hal ini. Namun di akhir bab ini, akan dijelaskan mengenai bagaimana ide pembangunan hijau ini dimaknai dan bagaimana operasionalisasinya dalam konteks berdesa.

Kedua, dari ide besar mengenai pembangunan hijau dan aset potensi SDA yang mereka miliki, kami mengenalkan mereka dengan kapasitas teknokratis dan instrumentatif. Salah satu instrumen yang kami kenalkan adalah *cascading*. Kerangka berpikir (*logic*) perencanaan dengan *cascading* atau instrumen sejenisnya memudahkan pemerintah desa dalam menyusun dokumen perencanaan (RPJM Desa). Dalam perencanaan pembangunan, metode ini sering disebut sebagai penurunan atau pemecahan berjenjang, yakni menurunkan dari visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, program, hingga kegiatan. Selama ini, desa merasa kesulitan dalam menurunkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan arah kebijakan. Selain itu, hambatan dalam membangun keterkaitan antara visi dan misi dengan program dan kegiatan juga dihadapi oleh desa. Arti penting dari pengenalan instrumen ini sebenarnya adalah untuk memastikan pemdes dan masyarakat memahami keterkaitan antara visi dan misi yang ingin dicapai dengan strategi dan program yang dirancang.

Hal ini akan menjadikan proses dan dokumen perencanaan menjadi lebih bermakna dan dapat dilacak kontribusi dari program yang dirancang terhadap pencapaian visi dan misi yang lebih besar.

Menginisiasi Nuansa Pembangunan Hijau dalam RPJM Desa Hijau

Sinergi perencanaan pembangunan kabupaten dan desa diperlukan untuk memastikan strategi ‘desa membangun’ oleh desa dan ‘pembangunan desa’ oleh kabupaten dapat bekerja seiring sejalan. Desa membangun mengandaikan bahwa pemerintah desa dapat merancang kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang berpijak pada kewenangan desa. Sedangkan, dengan paradigma pembangunan desa, pemerintah supra desa, terutama pemerintah kabupaten memainkan peran strategis untuk merancang kebijakan pembangunan di desa sesuai kewenangan kabupaten sekaligus menjadi ujung tombak pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan.

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Bulungan. Ini ditandai dengan visi dan misi yang kuat untuk mendorong kedaulatan pangan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Ditambah lagi, adanya program TAKE (Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi) memperkuat urgensi pembangunan yang dilandasi prinsip hijau dan berkelanjutan hingga ke level desa. Adanya indikator penilaian TAKE menjadi alat bantu bagi desa dalam merancang program dan kegiatan yang mendukung pembangunan hijau dalam dokumen perencanaan desa. Dengan demikian, desa dapat menegaskan corak atau nuansa pembangunan hijau dalam dokumen perencanaannya.

Di samping itu, dokumen IAD yang memuat arah pengembangan komoditas berbasis perhutanan sosial juga menjadi salah satu acuan dalam merancang dokumen perencanaan.

Dua acuan di atas juga menjadi bagian dari instrumen dalam melakukan review terhadap dokumen RPJM Desa. Review ini memang dimaksudkan untuk dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, dalam konteks ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta kecamatan untuk menjalankan peran pembinaan dan pengawasan. Setidaknya ada empat dimensi penting yang kami tinjau untuk mengukur sejauh mana nuansa RPJM Desa Hijau tersebut. **Pertama, dimensi penyajian dan analisis data SDA.** RPJM Desa sekurang-kurangnya mampu memberikan gambaran mengenai data potensi sumber daya alam baik kuantitatif maupun kualitatif serta menurunkannya ke dalam isu strategis berkaitan dengan permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan SDA berkelanjutan.

Kedua, dimensi sinergi dan konsistensi perencanaan. Aspek ini digunakan untuk menilai sejauh mana visi dan misi didasarkan pada aset dan potensi yang dimiliki desa serta menelaah konsistensi penyusunan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi. Dalam konteks Bulungan, sinergi dan konsisten perencanaan juga diukur dari sejauh mana keselarasan RPJM Desa dengan kebijakan pembangunan daerah, seperti RPJMD, Renstra DPMD, TAKE, dan dokumen IAD (Khusus desa-desa di Lanskap Kayan). **Ketiga, di aspek program,** pemdes perlu memastikan apakah RPJM Desa telah memasukkan program-program yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan strategi pembangunan hijau/berkelanjutan. Selain itu, penting untuk melihat bagaimana peta jalan perencanaan pembangunan dirancang serta berapa alokasi anggaran untuk program yang mendukung prinsip pembangunan hijau.

Keempat, instrumen review ini juga akan menilai sejauh mana potensi dampak program dari RPJM Desa baik secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Secara sosial misalnya, apakah program-program yang dirancang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa terkecuali (inklusif). Secara ekonomi juga akan dinilai apakah program-program dalam RPJM Desa dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan demikian pula secara ekologis, apakah program tersebut juga berdampak bagi kelestarian lingkungan. Proses review terhadap dokumen RPJM Desa di lanskap Kayan pun kami lakukan pada fase III dengan dokumen yang telah berjalan atau sebagian akan berakhir karena akan adanya pemilihan kepala desa. Karenanya review ini lebih dimaknai sebagai bahan evaluasi agar ke depan dokumen perencanaan desa di lanskap Kayan telah bercorak hijau atau mengarusutamakan prinsip lestari.

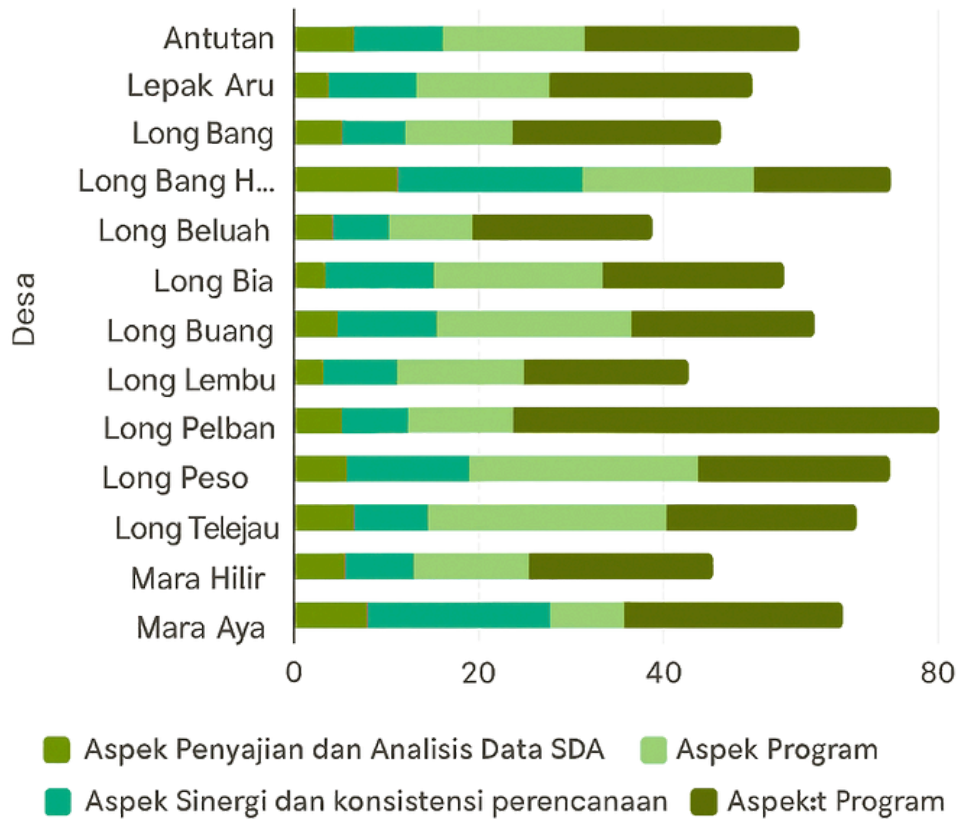


Gambar 4.1 Empat Aspek dalam Review RPJM Desa Hijau

Tabel dan grafik di bawah ini menunjukkan hasil penilaian (Skoring) terhadap RPJM Desa di 17 desa berdasarkan analisis atas dokumen RPJM Desa. Semakin baik kualitas dokumen di tiap aspek maka skornya akan semakin mendekati bobot maksimal.

Tabel 4.1 Skoring Review RPJM Desa Hijau di Lanskap Kayan

NO	DESA	ELEMEN PENILAIAN				TOTAL NILAI
		Aspek Penyajian & Analisis Data SDA (Bobot Maks 15)	Aspek Sinergi dan konsistensi perencanaan (Bobot Maks 20)	Aspek Program (Bobot Maks 30)	Aspek Potensi Dampak Program (Bobot Maks 35)	
1	Lepak Aru	3,0	10,7	16,0	23,3	53,0
2	Long Lembu	5,0	8,0	12,0	23,3	48,3
3	Long Telenjau	5,0	9,3	12,0	23,3	49,7
4	Long Bang	5,0	8,0	12,0	23,3	48,3
5	Long Buang	5,0	12,0	20,0	25,7	62,7
6	Antutan	4,0	13,3	16,0	23,3	56,7
7	Long Pelban	13,0	14,7	24,0	28,0	79,7
8	Long Lasan	3,0	9,3	14,0	18,7	45,0
9	Long Bia	3,0	13,3	18,0	23,3	57,7
10	Long Peso	6,0	16,0	24,0	28,0	74,0
11	Mara Hilir	4,0	8,0	12,0	16,3	40,3
12	Mara Satu	5,0	8,0	24,0	28,0	65,0
13	Long Beluah	4,0	6,7	10,0	21,0	41,7
14	Long Tunggu	8,3	20,0	6,7	15,0	50,0
15	Long Bang Hulu	11,7	21,7	20,0	18,3	71,7
16	Long Sam	7,0	9,3	26,0	28,0	70,3
17	Naha Aya	6,0	12,0	24,0	25,7	67,7



Gambar 4.2 Perbandingan Penilaian Tiap Desa dan Aspek

Review terhadap RPJM Desa di Lanskap Kayan di atas menunjukkan secara keseluruhan, dari 17 desa, terdapat 11 desa yang memiliki skor total di atas 50, artinya sebagian besar RPJM Desa di Lanskap Kayan mulai mengarusutamakan prinsip pembangunan hijau. Meski demikian, nampak bahwa data mengenai aset dan potensi desa masih belum digunakan secara utuh dalam proses perencanaan pembangunan.

Dari empat aspek penilaian, **aspek penyajian dan analisis data sumber daya alam** adalah yang paling lemah. Sebagian besar RPJM Desa, terutama pada Bab II RPJM Desa-nya belum menyajikan data kondisi dan ketersediaan aset dan potensi sumber daya alam, seperti kawasan kehutanan di desa, komoditas hasil hutan, produk unggulan desa, dll. Di samping lemah secara kuantitatif, belum ada analisis terhadap kondisi SDA yang ada di desa.

Dari **aspek sinergi dan konsistensi perencanaan**, sebagian besar RPJM Desa masih lemah dalam menghubungkan kebijakan desa dengan program prioritas kabupaten. Sementara itu, di **aspek program dan aspek potensi dampak program**, sebagian besar desa cenderung telah memiliki program-program perlindungan lingkungan dan pengelolaan SDA lestari serta alokasi anggaran yang mencukupi.

Berangkat dari upaya melakukan pengarusutamaan pembangunan hijau dalam dokumen perencanaan desa, penting untuk membongkar dan membangun perspektif pembangunan lestari dalam perencanaan pembangunan desa. Meski praktik keseharian mereka berdesa erat kaitannya dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA), namun inovasi dan internalisasi dalam kebijakan desa masih menjadi tantangan. Dalam konteks ini, DPMD berperan penting membangun ruang percakapan untuk menginternalisasi makna pembangunan hijau dan bagaimana menghubungkan teknokrasinya dalam dokumen perencanaan.

Mendampingi Desa Menyusun Peraturan Desa

Upaya perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam desa secara lestari tak bisa hanya sebatas membangun kesadaran dan pemahaman di antara pemerintah dan masyarakat desa.

Di banyak kasus, pemerintah desa perlu mengatur dan memastikan sumber daya alam yang ada dapat dikelola dalam prinsip-prinsip keberlanjutan melalui kerangka kebijakan dan regulasi desa. Di saat yang sama, komitmen kuat pemdes untuk pembangunan desa yang lestari dan berkelanjutan perlu dibuktikan dengan langkah nyata baik melalui kebijakan, program, maupun alokasi anggaran.

Salah satu langkah strategis yang ditempuh oleh hampir semua desa di Lanskap Kayan adalah menyusun kerangka regulasi untuk perlindungan dan pengelolaan ruang hidup dan penghidupan yang lestari. Meski langkah ini sebagian karena konsekuensi dari program TAKE yang digagas kabupaten, namun hal ini cukup membuka kesadaran desa bahwa mereka perlu memastikan wilayah kelola mereka dimanfaatkan melalui prinsip keberlanjutan. Secara umum, dari enam indikator TAKE, hampir semuanya mensyaratkan adanya kebijakan desa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini menjadi salah satu bukti kinerja desa dalam mendukung program TAKE.

Dengan kebutuhan ini, kami memfasilitasi Pemdes dan BPD untuk bersama-sama merancang dokumen peraturan desa, terutama yang bersentuhan langsung dengan tata kelola lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Beberapa dokumen perdes yang dihasilkan dari proses pendampingan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Perdes Tata Kelola Lingkungan Desa-Desa di Lanskap Kayan

NAMA DESA	PRODUK PERDES	INDIKATOR TAKE
Mara 1	Perdes tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Kebijakan desa tentang pengembangan pertanian berkelanjutan
Mara Hilir	Perdes tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Kebijakan desa tentang pengembangan pertanian berkelanjutan
Naha Aya	Perdes tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Kebijakan desa tentang pengembangan pertanian berkelanjutan
Peso	Perdes tentang Pengelolaan Sampah	Kebijakan desa tentang pengelolaan persampahan
Long Sam	Perdes tentang Kebersihan Lingkungan dan Pengelolaan Sampah	Kebijakan desa tentang pengelolaan persampahan
Long Sam	Perdes tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Mata Air Sungai Beletung	Kebijakan desa tentang perlindungan sumber mata air

Selama ini perangkat desa maupun BPD menganggap bahwa penyusunan peraturan di desa sulit dilakukan. Mereka terjebak dengan teknikalitas legal drafting.

Selain itu, proses penggalian gagasan dan ide untuk substansi perdes juga tidak ditempuh secara partisipatif. Akhirnya, ide pun buntu. Dengan melihat contoh dari desa lain yang seringkali tidak relevan, pemdes dan BPD semakin hilang arah menentukan substansi apa yang perlu diatur sehingga berujung pada ‘menjiplak’ dari contoh yang ada. Kami mencoba memfasilitasi proses legal *drafting* menjadi lebih bermakna dengan menggali ide dan gagasan dari mereka sendiri mulai dari kerangka (*outline*) hingga menguraikannya menjadi pasal demi pasal.

Peraturan desa untuk pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam bukan semata-mata alat administratif yang lahir dari kebutuhan pengaturan di tingkat desa. Perdes ini merupakan landasan penting bagi kapasitas pemerintah dan masyarakat lokal untuk berorganisasi, berpartisipasi, dan mengelola sumber daya bersama (*Common pool resources/CPR*) secara berkelanjutan. Ostrom (1990) dalam *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*, mengingatkan bahwa adanya aturan main yang dilembagakan dalam peraturan di tingkat lokal misalnya, dapat mencegah degradasi lingkungan dan dampak sosial ekonomi yang diakibatkan oleh tragedi kepemilikan bersama (CPR) (Ostrom, 1990).

Hadirnya peraturan di tingkat lokal membuktikan bahwa memberdayakan institusi lokal (Desa) dalam merancang dan menegakkan peraturan mereka sendiri merupakan langkah yang paling tepat dibandingkan dengan pemaksaan dari pihak eksternal/supra desa. Setidaknya ada tiga pembelajaran penting dari proses pendampingan penyusunan perdes ini. **Pertama, desa-desa di Lanskap Kayan harus selangkah lebih maju untuk membangun tata kelola lingkungan dan pengelolaan SDA di wilayah kelolanya secara berkelanjutan.**

Hal ini dilakukan melalui kerangka kebijakan (Perdes) yang dapat menjadi instrumen kontrol kolektif warga masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya bersama. Warga Long Peso yang berada di hulu selama ini resah dengan sampah warga yang langsung dibuang ke sungai sehingga mencemari daerah aliran sungai Kayan. Perdes menjadi langkah maju untuk mengkanalisasi keresahan warga akan pencemaran lingkungan di sekitar mereka.

Kedua, perdes yang disusun secara partisipatif dan tumbuh dari ide asli warga desa memungkinkan aturan tersebut dapat bekerja secara lebih efektif, mudah ditaati dan diterima oleh publik secara luas. Karena isi pengaturan lahir dari kebutuhan, pengetahuan, dan kearifan masyarakat, diharapkan perdes yang dilahirkan dapat dimengerti dan dipatuhi oleh masyarakat. Misalnya, penyusunan Perdes tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Mata Air Sungai Beletung di Desa Long Sam dilatarbelakangi tidak hanya karena kebutuhan untuk menjaga akses air bersih warga, namun juga dari ide kolektif untuk mengembangkan ekowisata di area kelola tersebut. Pengembangan ekowisata Sungai Beletung merupakan rencana pemdes dan masyarakat sebagai strategi untuk menjaga kelestarian lingkungan mata air sekaligus untuk meningkatkan pendapatan warga.

Ketiga, pelibatan pemdes dan BPD terutama orang mudanya dalam penyusunan perdes sekaligus sebagai bentuk peningkatan kapasitas politik dan kapasitas sebagai regulator. Di Desa Long Sam, terdapat sosok pemuda BPD bernama Vincent yang meluangkan waktu beberapa hari untuk menyelesaikan rancangan dua perdes penting mengenai lingkungan dan pemanfaatan SDA.

Dalam keyakinan kami, baik pemdes maupun BPD perlu memiliki kapasitas politik dengan kepekaan dalam memahami aspirasi masyarakat serta permasalahan nyata di desa. Selain itu, yang tak kalah penting adalah kapasitas regulatif dalam merancang peraturan di desa sebagai alat untuk mendorong tata kelola lingkungan dan sumber daya bersama secara berkelanjutan. Selama ini banyak anggota BPD dimana pun, yang mengeluhkan lemahnya peningkatan kapasitas mereka sebagai lembaga representasi di desa, terutama dari aspek legal *drafting* peraturan di desa.

BUM Desa untuk Pertumbuhan Hijau: Merintis Jalan Berliku

Institusi lokal telah lama dikenal memiliki peran sentral dalam keberlanjutan tata kelola hutan dan penghidupan masyarakat. Gibbson, McKean, & Ostrom (2000) menolak gagasan *tragedy of the commons* (kegagalan komunitas), yang mengklaim bahwa komunitas lokal secara alamiah gagal dalam mengelola sumber daya bersama, seperti hutan. Bagi mereka, dengan melihat bukti empirik di berbagai belahan dunia (Asia, Afrika hingga Amerika Latin), komunitas lokal mampu mengembangkan tatanan institusi mereka sendiri untuk mengelola sumber daya hutan secara lestari.

Dengan keyakinan serupa, buku ini juga ingin menunjukkan bahwa kehadiran institusi ekonomi di desa-desa lanskap Kayan menjadi salah satu entitas kelembagaan yang berperan penting dalam mengelola potensi SDA secara berkelanjutan. Jika merujuk pada konsep Pertumbuhan Hijau yang Inklusif (IGG) sebagaimana diuraikan dalam bab I, maka pengembangan usaha BUM Desa di Lanskap Kayan juga penting untuk mempedomani empat pilar (IGG), yakni (1) pengembangan ekonomi, (2) pemerataan kesempatan sosial, (3) produksi dan konsumsi hijau, dan (4) perlindungan lingkungan ekologis.

Dalam hal ini, BUM Desa di Lanskap Kayan tidak hanya berperan sebagai lembaga ekonomi yang inklusif namun juga mengemban misi ekologis untuk menjaga kelestarian bentang alam Kayan.

Untuk menuju transformasi BUM Desa sebagai salah satu penopang penting pertumbuhan hijau yang inklusif, institusi BUM Desa perlu memenuhi tiga aspek penting. **Pertama, kuat secara kelembagaan.** Hal ini ditandai dengan kelengkapan administrasi, badan hukum, kepengurusan BUM Desa yang lengkap dan aktif. **Kedua, partisipatif, transparan, dan akuntabel dari sisi tata kelola.** Kuncinya adalah tata kelola yang partisipatif melalui forum musyawarah desa, serta adanya akuntabilitas dan transparansi melalui laporan pertanggungjawaban. **Ketiga, pengembangan usaha berbasis SDA yang inklusif dan lestari.** BUM Desa mengembangkan sektor usaha berbasis aset dan potensi secara berkelanjutan.

Singkatnya, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan salah satu pilar penting dalam program pendampingan yang dilakukan oleh IRE dan YKAN di Lanskap Kayan. BUM Desa diposisikan bukan hanya sebagai lembaga ekonomi, melainkan sebagai strategi sosial-ekologis untuk memperkuat kedaulatan ekonomi desa, mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan mengorganisasi sumber daya lokal secara inklusif. Kami menangkap beberapa catatan penting selama mendampingi desa-desa di Lanskap Kayan dalam mengembangkan BUM Desa.

Pertama, sebagian BUM Desa bergerak lambat sebagai institusi ekonomi utama di desa, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam. Kami melihat ini bukan semata-mata masalah kapasitas sumber daya manusia pengurusnya. Banyak faktor berkelindan.

Akses pasar dan infrastruktur penggerak ekonomi yang masih terbatas di hulu menjadi tantangan tersendiri. Dari sisi kapasitas, kami melihat banyak potensi orang muda yang terlibat dalam pemerintahan desa memiliki potensi untuk berkembang yang setara dengan masyarakat di hilir. Banyak pula SDM unggul di sana. Namun demikian, sebagian dari mereka enggan berkiprah di BUM Desa karena sulitnya membayangkan peluang pengembangan usaha dalam keterbatasan infrastruktur yang ada. Dalam konteks ini, sebetulnya perlu ada terobosan untuk mengatasi problem transportasi dan infrastruktur pendukung ekonomi lainnya agar gerak ekonomi lokal dapat berjalan.

Di sisi lain, sebenarnya rantai pasok komoditas di lanskap telah cukup lama berjalan, tetapi dengan kelembagaan ekonomi informal antara petani-tengkulak. Namun, kelembagaan BUM Desa belum menjadi pilihan untuk mengembangkan usaha di desa. Sejalan dengan IAD, beberapa desa juga sebenarnya mulai merintis dan mengembangkan komoditas perhutanan sosial, seperti kakao dan kopi. Long Sam, Long Beluah, dan Antutan adalah desa-desa di lanskap yang memiliki produksi kakao yang cukup melimpah. Namun, lagi-lagi peran tengkulak sebagai salah satu institusi ekonomi telah cukup lama berjalan dan BUM Desa belum menjadi pilihan kelembagaan.

Kedua, relasi konfliktual antara pemerintah desa dan BUM Desa menjadi kendala bagi kinerja BUM Desa dan pengembangan usahanya. Relasi semacam ini berpengaruh terhadap kondisi kesehatan BUM Desa, tata kelola kelembagaannya, hingga berdampak pada implementasi usahanya. Jalur komunikasi yang terputus antara pemdes dan BUM Desa seringkali menyebabkan BUM Desa tidak mendapat dukungan penyertaan modal dari pemerintah desa. Padahal, BUM Desa telah siap dengan perencanaan usaha. Namun demikian, situasi konfliktual ini lambat laun berhasil terurai justru melalui ruang-ruang percakapan yang terbangun di arena-arena informal.

Ketiga, pragmatisme bisnis masih mendominasi karena kuatnya cara pandang pertumbuhan. Mengembangkan usaha berbasis jasa yang minim resiko seringkali ditempuh oleh BUM Desa demi mengejar omset atau sekadar menjalankan usaha agar BUM Desa hidup. Cara pandang ini banyak ditemui di berbagai wilayah. Padahal, desa-desa di lanskap Kayan kaya akan aset dan potensi SDA yang dapat dikembangkan. Seringkali kami harus memulai dengan membangun kesadaran akan aset dan potensi ini serta mengajak mereka untuk menemukenali potensi yang ada sebagai inspirasi untuk menyusun perencanaan usaha.

Di tengah situasi yang tidak mudah, sebenarnya cukup banyak praktik baik BUM Desa yang dikembangkan di desa-desa di lanskap. Hadirnya kelas-kelas belajar BUM Desa dimanfaatkan bagi BUM Desa untuk menata administrasi dan legalitas BUM Desa. Para pengurus BUM Desa bersama pendamping menyusun program kerja (proker), merancang dan melengkapi AD/ART, serta melakukan pendaftaran badan hukum. Itu dilakukan sebagai syarat untuk memperkuat kelembagaan BUM Desa. Tak hanya itu, BUM Desa Kayan Indah Naha Aya cukup aktif dari sisi kepengurusan dan telah memiliki badan hukum. BUM Desa ini pun telah memiliki usaha yang konsisten dijalankan, seperti penjualan voucher wifi, layanan air bersih, dan depo air minum. BUM Desa Karya Sejahtera Antutan juga menjadi salah satu BUM Desa yang aktif mengikuti kelas belajar, terutama untuk menyusun perencanaan usaha kakao dan laporan pertanggungjawaban BUM Desa.

Secara lebih rinci, kami mencatat dinamika perkembangan BUM Desa sejak awal penyelenggaraan kelas belajar (2022) hingga saat ini (2025). Selain catatan, kami juga melakukan penilaian perkembangan BUM Desa dengan instrumen skoring.

Penilaian ini untuk melihat perkembangan BUM Desa dari 7 aspek penilaian: (1) kelembagaan, (2) manajemen, (3) usaha, (4) kerjasama/kemitraan, (5) aset dan permodalan, (6) administrasi dan laporan keuangan, dan (7) keuntungan dan manfaat bagi desa serta masyarakat. Kondisi BUM Desa sebelum dan sesudah program (2025) dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.3 Perkembangan BUM Desa di Lanskap Kayan (2022-2025)

Desa	BUM Desa	Kondisi BUM Desa (2022)		Kondisi BUM Desa (2025)		Peluang Usaha, Tantangan, dan Capaian
		Jumlah Skor	Status	Jumlah Skor	Status	
Long Pelban	Belum Terbentuk	-	Belum Terbentuk	-	Belum Terbentuk	Potensi pengembangan usaha antara lain pada sektor <u>layanan</u> dasar seperti listrik, air, dan internet, hingga pemanfaatan potensi lahan untuk pengembangan usaha di bidang pertanian dan kehutanan. Tantangan masih terdapat kendala aksesibilitas dan pandangan akan kurangnya urgensi pembentukan BUM Desa.
Long Buang	BUM Desa Amerta Adijaya Long Buang	-	Belum Terbentuk	38.2	Perintis	BUM Desa telah memiliki kelengkapan legalitas dan rencana pengembangan usaha diantaranya pada bidang pertanian tanaman pangan (jagung), peternakan, dan pengolahan kakao. Tantangan masih terkendala pengurus BUM Desa yang belum aktif dan solid, konsistensi Pemdes - BUM Desa dalam merealisasikan rencana usaha, serta kapasitas pengelolaan usaha hulu - hilir.
Long Bia	BUM Desa Karya Kita Long Bia	26.5	Perintis	32.8	Perintis	BUM Desa telah menjalankan usaha penyewaan alat konstruksi dan memiliki rencana usaha antara lain pengelolaan layanan air bersih, pengelolaan dan pemanfaatan aset desa (Gedung BPU), pengelolaan sampah, serta rencana kerja sama dengan perusahaan. Akan tetapi tantangan utama masih pada belum aktif dan solidnya pengurus BUM Desa dan perlunya penguatan sinergitas antara Pemdes - BUM Desa.
Long Lasan	-	-	Belum Terbentuk	-	Belum Terbentuk	Kendala kesediaan dan ketersediaan SDM dan pengurus

Long Peso	BUM Desa Sinar Peso Long Peso	48.2	Perintis	65.3	Pemula	BUM Desa konsisten dalam menjalankan usaha dan memiliki tata kelola usaha yang cukup baik. Kedepannya diperlukan optimalisasi usaha, pengembangan kerja sama dan kemitraan, serta diversifikasi usaha termasuk penguatan rencana usaha pengelolaan ekowisata air terjun, pengelolaan air bersih, dan pengelolaan sampah plastik.
Lepak Aru	-	-	Belum Terbentuk	-	Belum Terbentuk	Kendala kesediaan dan ketersediaan SDM dan pengurus
Long Bang	BUM DesaLong Bang	25.7	Perintis	26.1	Perintis	BUM Desa memiliki pengurus yang lengkap meskipun belum terdapat usaha yang dijalankan, BUM Desa sudah mulai memiliki proyeksi usaha-usaha potensial sesuai dengan aset dan potensi yang ada di desa. Rencana usaha di sektor pertanian, agen sembako, jasa antar-jemput karyawan, dan molding. Tantangan reaktivasi pengurus melalui dukungan realisasi usaha, pemetaan untuk penguatan rencana realisasi usaha, serta perlunya penguatan dukungan pemerintah dan masyarakat desa.
Long Bang Hulu	-	-	Belum Terbentuk	-	Belum Terbentuk	Desa mulai memiliki inisiatif dalam membentuk BUM Desa melalui diskusi-diskusi terbuka lintas lembaga dan kelompok sektoral di desa. Rencana usaha yang diproyeksikan antara lain pengelolaan sumber air bersih dan budidaya komoditas pada sektor pertanian dan kehutanan. Tantangan masih kurangnya motivasi dari pemerintah desa dan masyarakat lokal dalam menginisiasi BUM Desa untuk mengembangkan perekonomian lokal.
Long Lembu	-	-	Belum Terbentuk	-	Belum Terbentuk	Kendala kesediaan dan ketersediaan SDM dan pengurus
Long Telenjau	-	-	Belum Terbentuk	-	Belum Terbentuk	Meski belum memiliki BUM Desa, akan tetapi pada beberapa diskusi terbuka, desa menyadari kehadiran BUM Desa dapat berkontribusi bagi pengembangan ekonomi lokal. Rencana pengembangan usaha dapat dilakukan pada sektor pengelolaan air bersih. Tantangan pengembangan BUM Desa yakni ketersediaan SDM pengurus.
Long Tunggu	BUM Desa Harapan Jaya Long Tunggu	29.8	Perintis	31.7	Perintis	Desa memiliki komitmen dan inisiatif yang kuat dalam pengembangan BUM Desa khususnya dalam mendukung realisasi rencana usaha pada

						sektor layanan dasar air bersih dan pengelolaan wisata air terjun. Dalam mendukung pengembangan BUM Desa terdapat tantangan aktivasi kelembagaan serta penguatan kapasitas usaha BUM Desa dalam mengelola usaha yang telah direncanakan. Penguatan dukungan serta sinergitas pemerintah desa dan masyarakat dibutuhkan dalam reaktivasi BUM Desa.
Naha Aya	BUM Desa Kayan Indah Naha Aya	42.1	Perintis	47	Perintis	BUM Desa konsisten dalam menjalankan usaha transportasi penyeberangan, depo air minum, serta penyedia layanan internet desa disertai dengan dukungan kelengkapan legalitas. Akan tetapi terdapat tantangan berkaitan dengan tata kelola usaha, peningkatan akuntabilitas, serta manajemen kerjasama agar BUM Desa dapat lebih optimal memberikan kontribusi bagi pembangunan desa dan penguatan kerjasama usaha. Rencana pengembangan usaha di bidang pertanian dan pengelolaan Sumber Daya Alam.
Long Beluah	BUM Desa Senguyun Long Beluah	26.5	Perintis	31.3	Perintis	Perlu intervensi pemerintah desa dan dukungan masyarakat dalam membenahan kelembagaan BUM Desa serta komitmen bersama dalam pengembangan BUM Desa untuk mendukung pembangunan desa serta meningkatkan produktivitas ekonomi desa dan masyarakat desa melalui pengembangan usaha sesuai dengan potensi lokal. Pengembangan usaha sektor pertanian dan kehutanan dapat menjadi opsi pengembangan usaha BUM Desa.
Long Sam	BUM Desa Long Sam Cahaya Mandiri Long Sam	43.9	Perintis	44.7	Perintis	BUM Desa konsisten dalam menjalankan unit usaha agen Gas LPG dengan dukungan penguatan tata kelola usaha. Kedepannya diperlukan penguatan kelembagaan serta diversifikasi usaha BUM Desa, terutama di sektor pertanian (termasuk agrowisata) dan kehutanan. Penguatan dukungan pemerintah desa dan masyarakat lokal juga dibutuhkan dalam pengembangan BUM Desa.
Mara Hilir	-	-	Belum Terbentuk	-	Belum Terbentuk	Kendala kesediaan dan ketersediaan SDM dan pengurus
Mara Satu	-	-	Belum Terbentuk	-	Belum Terbentuk	Kendala kesediaan dan ketersediaan SDM dan pengurus
Antutan	BUM Desa Karya Sejahtera Antutan	30.1	Perintis	50.3	Perintis	BUM Desa konsisten bertumbuh dan menjalankan usaha meski terdapat tantangan keaktifan pengurus. Rencana usaha ke depan

						yakni <i>scaling up</i> untuk pengembangan produk kakao dengan melibatkan masyarakat dan lembaga lokal desa. Diperlukan penguatan sinergitas dan dukungan pemerintah desa dan masyarakat lokal dalam pengembangan BUM Desa.
--	--	--	--	--	--	---

Berdasarkan tabel di atas, nampak bahwa ada BUM Desa yang mengalami peningkatan skor secara signifikan, namun ada pula yang cukup landai. Dinamika di masing-masing desa sangat dipengaruhi oleh relasi kelembagaan antara pemdes dan BUM Desa, keaktifan pengurus BUM Desa, serta aspek eksternal lainnya (iklim usaha/perencanaan usaha).

Pengalaman dari desa-desa di Lanskap Kayan menunjukkan bahwa pendirian BUM Desa memerlukan waktu yang cukup, pendampingan berkelanjutan, serta keberanian untuk memulai berdasarkan kondisi nyata desa tersebut. Tidak semua desa dapat segera membentuk BUM Desa; namun demikian, proses belajar, penyusunan visi, dan pengorganisasian potensi lokal merupakan modal awal yang sangat berharga. Pembelajaran ini mengindikasikan bahwa keberhasilan BUM Desa terletak pada kekuatan proses yang dijalani, bukan hanya pada hasil akhir yang formal.

Menemani Kabupaten Memberdayakan Desa: Menjadi Bagian dari Mitra Bulungan Berdaulat (MBB)

Dalam konteks advokasi kebijakan, keterbukaan dan responsivitas pemerintah daerah menjadi faktor kunci keberhasilan untuk mendesakkan perspektif dan cara kerja baru dalam memberdayakan desa-desa di daerahnya. Keterbukaan itu nampak kuat dalam ruang yang terbuka lebar bagi organisasi masyarakat sipil dan NGO melalui Mitra Bulungan Berdaulat (MBB) untuk menemani kabupaten dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Adanya MBB menjadi penanda bahwa keberhasilan sekecil apapun bagi desa-desa di Bulungan merupakan akumulasi dari kerja-kerja kolektif antara pemda, desa, perguruan tinggi, dan MBB.

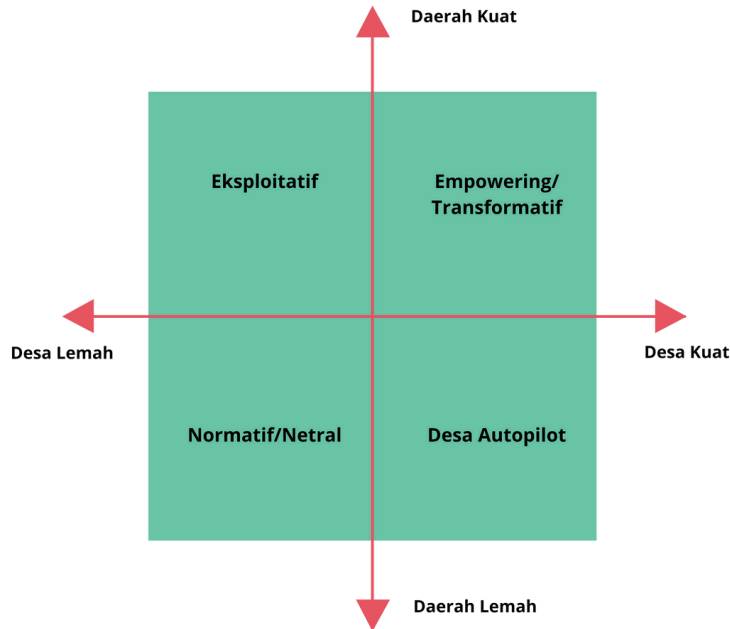
Sejak awal program ini, Bupati Bulungan Periode 2021-saat ini, Syarwani memberi pesan kuat keberpihakannya pada penguatan desa-desa di Kabupaten Bulungan melalui visi misi dan orientasi kebijakan daerah. Tak terkecuali desa-desa di Lanskap Kayan. Terlebih seiring dengan penetapan dokumen *Integrated Area Development* (IAD), pembangunan yang lestari menjadi pijakan penting. Peluang kebijakan ini menjadi pintu masuk bagi kami—sebagai bagian dari MBB—untuk mendorong laju pembangunan desa-desa, terutama di lanskap. Dalam hal ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menjadi salah satu mitra penting yang secara regulatif berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atau dalam makna lain, memberdayakan desa-desa di Bulungan. Meski demikian, kami juga dipertemukan oleh Sekretaris Daerah dengan perangkat daerah lain yang hampir sebagian besar memiliki irisan dengan isu desa dan kawasan perdesaan, seperti Dinas Pertanian, Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan, dsb.

Bagian ini akan memberikan catatan reflektif mengenai sejauh mana daya tanggap daerah mampu mendorong perubahan di level desa secara keseluruhan. Bagian ini menggarisbawahi bahwa narasi perubahan di masing-masing desa juga tidak terlepas dari proses perubahan cara pandang dan cara kerja di level perangkat daerah. Geliat desa membangun akan semakin optimal jika daerah juga aktif dalam membangun desa.

Menjadi Mitra DPMD untuk Memberdayakan Desa

Sejauh pengamatan kami terhadap berbagai pemerintah daerah (kabupaten/kota) di Indonesia dan relasinya dengan desa, kami menemui beberapa tipologi relasi antara pemda dengan desa.

Tarik-menarik relasi antara pemda dengan desa sangat mempengaruhi seberapa jauh desa dapat leluasa menjalankan kewenangannya. Setidaknya ada empat tipologi relasi desa dan kabupaten, sebagaimana diilustrasikan dalam gambar di bawah ini:



Gambar 4.3 Tipologi Relasi Desa-Kabupaten (Sumber: IRE, 2025)

Pertama, desa yang kuat namun pemerintah daerahnya lemah menyebabkan desa cenderung digerakkan oleh inisiatifnya sendiri secara otonom. Desa bekerja cenderung tanpa peran pembinaan dan pengawasan yang optimal dari kabupaten. Dengan demikian, desa cenderung **autopilot**, bergerak sendiri-sendiri. **Kedua**, desa yang lemah dan kapasitas daerah yang juga lemah menyebabkan relasi yang cenderung normatif, dimana peran pembinaan dan pengawasan kabupaten hanya bersifat rutinitas birokrasi tanpa upaya lebih maju untuk berubah.

Ketiga, dengan kapasitas desa yang lemah dan daerah yang kuat, relasinya cenderung eksploitatif terhadap desa. Kuasa kabupaten yang kuat dimanfaatkan untuk menjadikan desa sebagai objek pembangunan, arena proyek, atau sumber data semata. **Keempat**, tipologi yang paling ideal dimana daerah dengan kapasitas yang kuat mampu menjalankan peran pemberdayaan untuk mentransformasi desa-desa agar semakin maju dan mandiri. Dalam amatan kami, Kabupaten Bulungan telah secara konsisten menuju ke tipologi yang ideal ini.

Dari pengalaman dan refleksi kami selama ini, kemitraan antara IRE dan DPMD tidak sekadar bertujuan untuk mendorong penguatan desa. Namun juga mengajak DPMD untuk membangun semangat *memberdayakan* desa-desa di Bulungan sebagai institusi di level daerah yang paling intensif menemani desa. Hal ini ditandai dengan komitmen politik yang kuat di awal program dan kemauan kuat DPMD dalam mendorong perubahan kerja-kerja yang lebih progresif di desa. Proses ini diawali dengan melakukan review dan internalisasi RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) DPMD Tahun 2021-2026 bersama mitra pembangunan yang lain untuk mengetahui sejauh mana capaian program DPMD serta bagaimana dukungan Mitra Bulungan Berdaulat untuk pencapaian program. Langkah ini menunjukkan adanya upaya sinergi antara kerja-kerja birokrasi dengan kerja pendampingan/pemberdayaan yang diperankan oleh MBB di desa.

Kolaborasi antara IRE dengan DPMD juga terbangun dalam kelas-kelas belajar yang diselenggarakan bersama. IRE, DPMD, PIONIR, dan mitra lainnya berbagi peran dan sumber daya (termasuk komitmen anggaran) dalam penyelenggaraan kelas belajar ini.

Konsolidasi sumber daya pun berlangsung dimana IRE memfasilitasi narasumber, DPMD menyediakan ruang belajar dan pendukungnya, dan desa dengan pembiayaan mandiri. Kelas belajar ini tidak hanya menjadi ruang belajar bagi desa, namun para penyelenggaranya juga turut saling belajar. MBB mengambil pembelajaran dari DPMD mengenai kerja teknokrasi, seperti Siskeudes dan perencanaan. Demikian pula dengan DPMD yang juga turut mengambil pembelajaran dari MBB mengenai bagaimana memfasilitasi desa dan strategi peningkatan kapasitas yang ‘melampaui’ bimtek pada umumnya.

Engagement antara MBB dengan pemda telah mengaktivasi ruang percakapan desa yang membahas isu-isu desa dan kawasan perdesaan. Di awal program, nampak bahwa isu desa masih dipandang semata hanya *domain* dari DPMD. Sementara, perangkat daerah lain sibuk dengan sektor kerjanya masing-masing. Padahal, isu-isu pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, dll sebenarnya bermuara pada desa sebagai arena program. Adanya ruang percakapan desa kemudian mulai mencairkan sekat-sekat kerja sektoral dimana kesadaran bahwa desa menjadi lokus dari program-program perangkat daerah mulai terbangun.

Kolaborasi Program Pendampingan Desa (Pendamping dan NGO)

Banyak daerah yang memiliki beberapa skema program pendampingan desa mulai dari pendampingan oleh Kemendesa PDTT (Pendamping P3MD), pendampingan oleh perusahaan, hingga pendamping yang direkrut oleh kabupaten. Dinamika antar pendamping pun beragam satu dengan yang lain. Ada yang relasinya saling melengkapi (komplementer), ada yang sinergis, namun ada pula yang berjalan masing-masing tanpa koordinasi, bahkan ada yang saling bersaing.

Dalam konteks Bulungan, sinergi dan koordinasi cukup baik berjalan antara pendamping P3MD dengan pendamping kabupaten (Pendamping ADD). DPMD dapat dengan mudah membangun koordinasi dengan koordinator masing-masing pendamping, bahkan menjalin relasi yang baik dengan pendamping (*community development officer*) perusahaan yang mendampingi desa-desa di Bulungan. Ini tentu saja menjadi modal penting untuk menggerakkan pendamping dalam memfasilitasi penguatan desa-desa di Bulungan, khususnya di Lanskap Kayan.

Dalam keyakinan kami, pendampingan harus dimaknai sebagai salah satu strategi untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan desa. Karenanya sinergi perlu dibangun antara kabupaten dan desa dengan prinsip terstruktur, komprehensif, dan terukur. **Terstruktur** merujuk pada desain program pendampingan yang terkoordinasi dari DPMD sebagai penanggung jawab, Kecamatan, hingga Pemerintah Desa. **Komprehensif** dimaksudkan bahwa pendampingan harus menyentuh seluruh aspek yang penting untuk diintervensi, mulai dari aspek kebijakan, kelembagaan hingga kapasitas. **Terukur** artinya seluruh proses pendampingan harus dipandu oleh kerangka kerja dan instrumen yang dapat terus dipantau dan dievaluasi kemajuannya.

Oleh karena itu, sepanjang diskusi yang intensif dengan pemerintah daerah, peran pendamping di Kabupaten Bulungan, menurut perspektif daerah, sangat strategis dan berarti. Karenanya, kami berkomitmen untuk memperkuat kapasitas pendamping agar memiliki pengetahuan yang komprehensif mengenai substansi pendampingan. MBB bersama dengan DPMD juga bersepakat pentingnya memperkuat kapasitas pendamping agar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam isu-isu desa, seperti perencanaan dan penganggaran, pendampingan BUM Desa, dan fasilitasi masyarakat.

Kami menyadari bahwa kelas belajar yang diselenggarakan tidak cukup untuk mampu memfasilitasi peningkatan kapasitas desa secara komprehensif. Dengan pertimbangan tersebut, kami dan DPMD menyepakati perlunya peningkatan kapasitas bagi pendamping. Beberapa kegiatan kolaboratif terselenggara dalam bentuk kelas belajar untuk pendamping dengan materi seputar perencanaan dan penganggaran, hingga pendampingan BUM Desa.

Bulungan Menuju Transformasi Pembangunan Hijau

Pembangunan hijau (*green development*) merupakan konsep yang kontestatif dengan watak dan praktik beragam, tergantung pada konteks dan ideologi macam apa yang mempengaruhi wacana tersebut. Ketegangan dalam pemaknaan “hijau” pun berlangsung tidak hanya dalam ranah konseptual semata, namun juga dalam praktik kebijakan dan situasi nyata di tingkat tapak. Pembangunan hijau dalam kacamata pasar/neoliberal akan sama sekali berbeda dalam makna, cara kerja, dan praktiknya dengan pembangunan hijau yang menekankan keadilan lingkungan (*environmental justice*). Di tingkat global, ada satu pemahaman bahwa tidak ada resep ‘satu ukuran untuk semua (*one size fits all*)’ dalam menerapkan strategi pertumbuhan hijau. Negara-negara maju, berkembang, dan berkembang akan menghadapi tantangan dan peluang yang berbeda, begitu pula negara-negara dengan kondisi ekonomi dan politik yang berbeda (OECD, 2011).

Meski demikian, buku ini tidak akan larut dalam perdebatan wacana tersebut dan mencoba mengambil sisi yang lebih berdamai dengan konteks dan situasi objektif yang kami hadapi di tingkat lokal. “Lokal” yang dimaksud di sini adalah konteks dinamika politik kebijakan di daerah dan realitas nyata di tingkat desa.

Memaksakan satu perspektif pembangunan hijau belum tentu kompatibel dengan kenyataan dan dinamika yang kami hadapi di Bulungan. Namun satu hal yang sangat perlu diapresiasi adalah Bulungan secara eksplisit mengambil frasa “pembangunan hijau” sebagai visi dan misi pembangunan daerah yang hendak direalisasikan lima tahun mendatang. Sedalam apa dan corak hijau semacam apa yang dipilih tentu akan terus dikawal oleh banyak pemangku kepentingan, tak terkecuali Mitra Bulungan Berdaulat. Ada dua pembelajaran penting dalam melihat Bulungan yang tengah menuju pembangunan hijau.

Pertama, Bulungan tengah membangun tata kelola lingkungan (*environmental governance-nested enterprise*) untuk mendorong pembangunan hijau. Seiring dengan kerumitan masalah lingkungan dan serbaneka permasalahan tata kelola SDA, situasi saat ini menuntut tak hanya peran negara untuk menanganinya. Lemos & Agrawal (2006) telah menyoroti pergeseran pendekatan tradisional yang menekankan peran pemerintah sebagai pihak utama dalam menangani isu-isu lingkungan. Gagasan tata kelola lingkungan (*environmental governance*) menandai semakin meluasnya jejaring aktor yang terlibat dalam merespon masalah lingkungan dan tata kelola SDA. *Environmental governance* ini mencakup keseluruhan proses pengambilan keputusan, pembentukan aturan, dan penetapan norma yang melibatkan lintas aktor dan multilevel (pemerintah, NGO, swasta, lembaga donor, dan kelompok adat) dalam melindungi, mengelola, dan memanfaatkan lingkungan secara berkelanjutan (Lemos & Agrawal, 2006).

Apa yang telah dan sedang dikerjakan oleh pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat, serta Mitra Bulungan Berdaulat dimana IRE ada di dalamnya, di Kabupaten Bulungan, sebetulnya untuk memastikan tata kelola

lingkungan (*environmental governance/EG*) dapat efektif dan berdampak signifikan bagi kelestarian ekologi dan kesejahteraan masyarakat di Bulungan. Untuk dapat memahami secara sistematis bagaimana EG ini bekerja, kita dapat meminjam konsep *Nested Enterprise* (institusi berlapis atau struktur bersarang) dari Ostrom (1999).

Ide utama dari *nested enterprise* adalah bahwa pengelolaan sumber daya alam berskala besar dan kompleks memerlukan berbagai tingkatan yang saling berjejaring satu sama lain mulai dari level komunitas/desa hingga tingkat daerah bahkan pusat. Lanskap Kayan yang membentang dari hulu ke hilir memiliki potensi ekologis yang besar dan kompleks yang pengelolaannya melampaui sekadar satu atau dua komunitas lokal, sehingga perlu keterlibatan lintas aktor dan lintas sektor. Mengapa *nested enterprise* ini relevan dalam konteks Bulungan? Tata kelola lingkungan (EG) di tingkat lokal (desa) dapat diperkuat sesuai dengan kewenangannya, sementara struktur yang lebih tinggi (kabupaten) dapat memberi kerangka kerja, kebijakan, dan dukungan yang lebih luas. Dalam ruang percakapan di kabupaten selama ini, gagasan ini kemudian berkembang menjadi upaya sinergi pembangunan lestari antara desa dengan kabupaten, antara RPJM Desa dengan RPJMD.

Kedua, transformasi menuju pembangunan hijau di Kabupaten Bulungan dapat bekerja optimal dengan interseksi kekuatan dari tiga institusi kunci, yakni negara (pemerintah kabupaten dan desa), warga (lembaga ekonomi desa, kelompok warga), dan pasar (swasta). Politik transformasi yang didorong oleh negara (*state-led transformation*) berorientasi pada penguatan kebijakan dan regulasi yang memungkinkan strategi pembangunan hijau dapat berjalan di desa dan kabupaten.

Kebijakan perencanaan desa dan kabupaten yang termuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RPJM Desa, dan IAD perlu memastikan adanya program dan kegiatan serta alokasi anggaran yang mendukung pembangunan hijau. Adanya kebijakan TAKE menjadi bukti konkrit bagaimana negara memberikan insentif anggaran bagi desa-desa yang telah berkinerja dalam pengelolaan sumber daya alam lestari dan aktif melindungi lingkungan.



Gambar 4.4 Politik Transformasi untuk Pembangunan Hijau

Sementara itu, *Citizen-led transformation* bertumpu pada gerakan sosial ekonomi kolektif warga desa melalui kelembagaan ekonomi lokal (BUM Desa, koperasi) dan kelompok warga (KUPS, LPHD, kelompok tani, kelompok perempuan dll) yang mendukung pengelolaan sumber daya alam yang lestari di desa. Dalam konteks ini, kelompok-kelompok masyarakat dan BUM Desa juga perlu bergerak memperkuat kapasitas, tata kelola, dan pengembangan usaha berbasis sumber daya alam.

Sedangkan, yang tidak kalah penting, bagaimana komoditas dan produk unggulan warga berbasis pengelolaan hutan dan SDA dapat diakses oleh pasar sehingga penting untuk mendorong *market-led transformation* juga hadir. Ini berkaitan dengan memastikan akses pasar untuk komoditas SDA sehingga memberikan insentif guna melestarikan dan mengelola SDA secara berkelanjutan. Negara (aka pemda) juga dapat mengundang pasar untuk menyerap komoditas berbasis SDA di Bulungan. Kita membayangkan misalnya komoditas yang dihasilkan di hulu (Sungai Kayan), seperti kopi, kakao, rotan, dan hasil hutan bukan kayu lainnya mendapat akses pasar di hilir, bahkan ke luar Bulungan. Namun demikian, rambu-rambu pertumbuhan hijau yang inklusif sebagaimana dijelaskan dalam bab 1, mesti menjadi perhatian. Usaha ekonomi harus membuka kesempatan kerja secara inklusif serta harus mampu menjaga kualitas lingkungan hidup dan pelestarian SDA.

Sebagai penutup, catatan akhir ini diharapkan dapat membuka ruang percakapan mengenai pembangunan hijau seperti apa yang berlangsung di Bulungan. Dalam keyakinan kami, Kabupaten Bulungan ada dalam rute untuk menuju pembangunan hijau tersebut. Peran multipihak baik pemda, desa, mitra bulungan berdaulat, maupun swasta adalah memastikan “isi” dari pembangunan hijau tersebut memang untuk menjamin kelestarian sumber daya alam, melindungi alam dari kerusakan, sembari meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat ini dan generasi mendatang.****



LITERATUR

Gibson, C. C., McKean, M. A., & Ostrom, E. (Eds.). (2000). *People and forests: Communities, institutions, and governance*. The MIT Press.

Habermas, J. (1989). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society* (T. Burger & F. Lawrence, Trans.). MIT Press. (Original work published 1962)

Hardiman, F. B. (2009). *Demokrasi deliberatif: Menimbang 'Negara hukum' dan 'Ruang publik' dalam teori diskursus Jürgen Habermas*. Kanisius.

Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta. (2017). *Situs baru demokrasi lokal*. IRE Press.

Lemos, M. C., & Agrawal, A. (2006). Environmental governance. *Annual Review of Environment and Resources*, 31(1), 297–325.

Mariana, D. et. al (2025). *Daerah Inovatif BUM Desa Produktif: Cerita Perubahan Pendampingan 33 Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara*. PT. Visi Karsa Nusantara

Moraes, J. F., D'Amato, M. E., Ferreira, F. L., & Almeida, M. I. (2021). A framework for identifying and integrating sociocultural and environmental elements of indigenous peoples' and local communities' landscape transformations. *Perspectives in Ecology and Conservation*, 19(3), 143–152.

OECD. (2011). *Towards green growth*. OECD Publishing. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264111318-en>

Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.

Scoones, I. (2016). The politics of sustainability and development. *The Annual Review of Environment and Resources*, 41, 293–319. <https://doi.org/10.1146/annurev-environ-110615-090039>

Toumbourou, T. D., & Dressler, W. H. (2024). The politics of misalignment: NGO livelihood interventions and exclusionary land claims in an Indonesian oil palm enclave. *Critical Asian Studies*, 56(1), 89–114. <https://doi.org/10.1080/14672715.2023.2272736>

United States Agency for International Development (USAID). (2013). *Automated Directives System Chapter 205: Integrating gender equality and female empowerment in USAID's program cycle*. U.S. Agency for International Development.





Mengenang yang Telah Berpulang

Proses perjumpaan, pembelajaran dan kebersamaan bersama desa-desa di Kabupaten Bulungan, terkhusus Lanskap Kayan adalah sebuah pengalaman dan perjumpaan berharga bagi IRE Yogyakarta. Kami banyak belajar, berefleksi, dan terinspirasi melalui berbagai interaksi dan dialog yang terbangun hangat dan bersahabat. Namun demikian, dalam perjalanan dua tahun terakhir ini, kami kehilangan dua orang tokoh yang amat penting bagi kami.

Pertama adalah Kades Peso Bapak Pulinop Jaui. Sosoknya adalah salah satu yang paling “menyala” dan “berisik”, “menyala” dengan gagasan dan imajinasinya akan pembangunan desa, “berisik” dengan berbagai pertanyaan, keresahan dan kegelisahan yang kerap kali membakar topik-topik percakapan dalam ruang-ruang “tongkrongan”. Di balik sosoknya yang terlihat “santai” dan “jenaka”, Pak Pul, begitu kami memanggilnya, adalah sosok pemimpin, kepala desa, teman dan sahabat yang memiliki cinta untuk desa, untuk Kayan.

Tidak hanya untuk Pak Pulinop, selama program berlangsung, kepergian Kepala Desa Mara Hilir juga menambah catatan kehilangan temanjuang di Lanskap Kayan. Ungkapan rasa terimakasih, apresiasi, dan penghargaan yang sebesar-besarnya kami sampaikan untuk semua kepala desa, sekretaris desa, para kaur dan kasi desa, pengurus BUM Desa, BPD, semua perangkat desa dan segenap pengabdian desa lainnya yang rela menempuh jauh jaraknya dan terjalnya medan. Bagi kami, Lanskap Desa adalah “rumah” lain yang tidak hanya memberi banyak pelajaran dan pengalaman berharga, tapi juga memberi rasa hangat akan keluarga, persahabatan dan kebersamaan.



Setiap **desa** punya cerita
Tentang alam yang senantiasa dijaga
Tentang tangan-tangan yang setia melestarikannya
Perubahan kecil pun menyimpan makna besar –
Sebagai bukti kedaulatan atas sumber daya yang **desa** miliki bersama.

Perubahan bukan tentang besar atau kecilnya langkah
Bukan pula sekadar tentang hasil yang tampak
Perubahan adalah perjalanan
sebuah proses yang menuntun kita menuju keberhasilan

IRE percaya – setiap kisah, setiap narasi,
adalah cahaya kecil yang menuntun menuju **desa** yang lestari dan berdaya.

